

**MENURUNNYA KEBEBASAN BERSERIKAT DAN  
BERKUMPUL PADA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI)  
LAMPUNG 2016**

(Skripsi)

Oleh

**THEO REYNOL SANDY**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## ABSTRAK

### MENURUNNYA KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL PADA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) LAMPUNG 2016.

Oleh

**THEO REYNOL SANDY**

Capaian skor kebebasan berserikat dan berkumpul pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Lampung pada tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat signifikan, lebih dari 75 poin. Penelitian ini bertujuan untuk; (1). Menemukan alasan sebenarnya penurunan pada kebebasan berserikat dan berkumpul tersebut, (2). Menemukan dampak serta (3). Menemukan apa saja upaya yang telah pemerintah lakukan. Metode penelitian kualitatif melalui pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa faktor penyebab penurunan tersebut adalah adanya peningkatan ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang dilatarbelakangi tiga kejadian; (1). Pembubaran aksi penggalangan dana melawan Aqsa Working Group dan santri Pondok Pesantren Al Fatah, Muhajirun dengan disertai perobekan atribut oleh Pol PP. (2). Demonstrasi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang berakhir ricuh dengan disertai kekerasan oleh aparat kepolisian dan (3). Pembekuan Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Budaya Islam (UKM-SBI) UIN Raden Intan Bandar Lampung oleh rektorat. Pemerintah menolak dianggap sebagai satu-satunya pihak yang bersalah dalam hal ini, menurutnya, pihak sipil-lah yang seharusnya disalahkan karena telah bertindak *Uncivil* dan pemerintah hanya merespon hal tersebut. Namun setelah dianalisis secara teoritis, terbukti bahwa pemerintah dalam kejadian ini telah melanggar norma-norma demokrasi. Walaupun tidak berdampak pada berkurangnya keinginan para aktivis untuk terus menyuarakan aspirasinya, tapi tetap merugikan Provinsi Lampung, karena sumberdaya yang seharusnya dapat digunakan untuk hal yang produktif menjadi perlu dialihkan untuk mengatasi permasalahan ini. Pemerintah sudah berupaya membentuk Pokja (Kelompok Kerja) IDI namun belum dimanfaatkan secara maksimal serta belum ada program yang dibuat khusus untuk mengatasi permasalahan, terkendala *political will*, dana dan integrasi *stakeholder*.

**Kata Kunci:** Hak-Hak Politik, Lembaga Demokrasi, *political will*, IDI.

## **ABSTRACT**

### **DECREASED FREEDOM OF ASSEMBLY AND ASSOCIATION IN THE INDONESIAN DEMOCRACY INDEX (IDI) LAMPUNG 2016**

**By**

**THEO REYNOL SANDY**

The achievement of the score of freedom of association and assembly in the Indonesian Democracy Index (IDI) Lampung in 2016 experienced a very significant decline, more than 75 points. This research aims to; (1). Finding the real reason for the decline in freedom of association and assembly, (2). Find impact and (3). Find out what efforts the government has done. Qualitative research methods through data collection interviews and documentation. This study found that the factor causing the decline was an increase in threats / use of violence by government officials against three incidents; (1). Dissolution of the Aqsa Volunteer Working Group fundraising action and Al Fatah Islamic Boarding School students' boarding school, Muhajirun, accompanied by tearing of attributes by Pol PP. (2). Demonstrations of students of the State Islamic University (UIN) Raden Intan Lampung which ended in chaos accompanied by violence by police and (3). Freezing of Islamic Cultural Arts Student Activity Unit (UKM-SBI) UIN Raden Intan Bandar Lampung by the rector. The government refuses to be considered as the only party guilty in this matter, according to him, it is the civilian party who should be blamed for acting Uncivil and the government only responds to it. But after being analyzed theoretically, it was proven that the government in this incident had violated democratic norms. Although it does not have an impact on the reduced desire of activists to continue to voice their aspirations, but still harms Lampung Province, because resources that should be used for productive things need to be diverted to overcome this problem. The government has tried to form a Working Group (Working Group) of the IDI but has not been used to its full potential and there are no programs specifically designed to address problems, constrained political will, funds and stakeholder integration.

**Keywords:** Political Rights, Democratic Institutions, political will, IDI.

**MENURUNNYA KEBEBASAN BERSERIKAT DAN  
BERKUMPUL PADA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI)  
LAMPUNG 2016**

**Oleh**

**THEO REYNOL SANDY**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

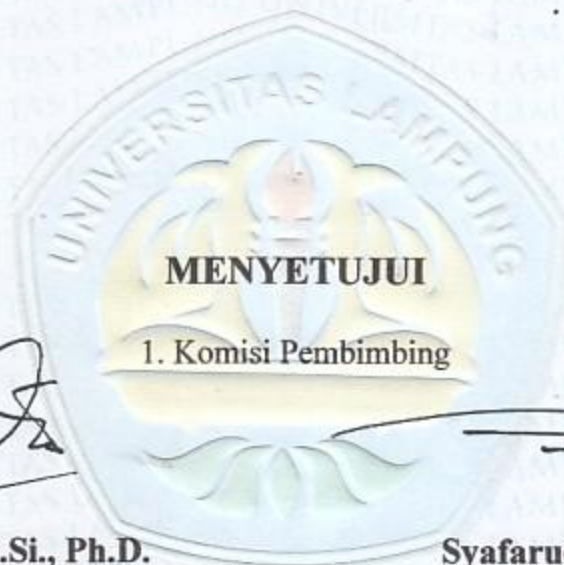
Judul Skripsi : **MENURUNNYA KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL PADA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) LAMPUNG TAHUN 2016**

Nama Mahasiswa : **Theo Reynol Sandy**

No. Pokok Mahasiswa : **1416021107**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**  
NIP 19601010 198603 1 006

**Syafarudin, S.Sos., M.A.**  
NIP 19720113 200501 1 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

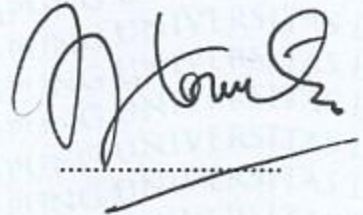
**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**  
NIP 19611218 198902 1 001



**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

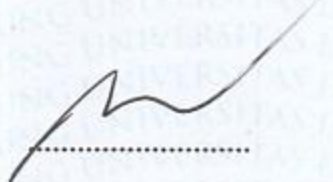
Ketua : **Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**



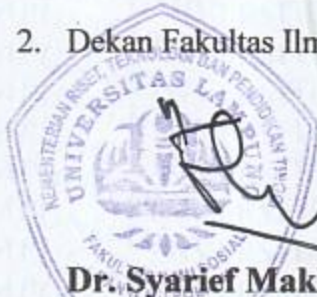
Sekretaris : **Syafarudin, S.Sos., M.A.**



Penguji : **Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dr. Syarif Makhya**  
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : 12 September 2018

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 24 September 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Theo Reynol Sandy  
NPM. 1416021107

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Theo Reynol Sandy, dilahirkan di Karya Penggawa, Krui, Pesisir Barat pada 17 Mei 1996. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Surizal Zikri dan Ibu Herliyana.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tahun 2002-2008 di SDN Kebuayan Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat. Setelah lulus SD penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Pesisir Tengah Krui Pesisir Barat 2008-2011 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAS Al-Kautsar 2011-2014.

Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2014.



## **MOTTO**

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 216).*

*“Stay Hungry. Stay Foolish” (Steve Jobs)*

*“Through time of challenge we often learn the most valuable lesson”*

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamduillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhoi Ya Allah langkah hambaMu,  
Sehingga Skripsi ini pada akhirnya dapat terselesaikan pada waktunya.

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW  
Semoga Kelak Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

“Ayahanda Ku Surizal Zikri dan Ibunda Ku Herliyana” Terima Kasih atas Doa dan Kasih Yang Tiada Habisnya serta Setiap Perjuangan yang Telah kalian Curahkan untuk Seluruh Anak-Anaknya. Semoga Karya Ini Dapat Membuat Bangga dan Memberikan Kebahagiaan Atas Segala Jerih Payah yang Telah Dikerjakan

“Kakak Ku” Randy Rizqi Utama dan “Adik Ku” Fatra Hariz Akrom. Terima Kasih Atas Segala Doa, Kasih Sayang, Canda Tawa dan Semangat yang Telah Kalian Berikan.

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi yang berjudul “Menurunnya Kebebasan Berserikat dan Berkumpul Pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Lampung 2016” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Kedua orang tua, Ayahanda dan Ibunda tercinta, Surizal Zikri dan Herliyana. atas segala doa, cinta dan kasih sayang, dukungan dan semangat serta perhatian yang terus mengalir yang tidak akan mampu penulis balas segala jasa dan kebaikannya sampai kapanpun. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan, kasih sayang, dan surga-Nya sebagai balasan atas segala jasa dan kebaikan Ayahanda dan Ibunda tercinta.

2. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D. selaku pembimbing pertama penulis. Terima kasih atas ilmu, masukan serta saran yang sangat membangun terutama dalam proses menyelesaikan skripsi ini, terima kasih juga atas kebaikan serta segala pengertiannya selama proses menyusun tulisan ini. Semoga segala kebaikan bapak akan diterima oleh Allah SWT dan semoga limpahan rahmat serta karunia-Nya selalu tercurahkan kepada bapak baik di dunia maupun di akhirat kelak.
3. Bapak Syafarudin, S.Sos. M.A. selaku pembimbing kedua. Terima kasih atas kesabarannya untuk meluangkan waktu guna membimbing penulis, atas segala ilmu, saran yang sangat bermanfaat serta tak lelah untuk selalu memotivasi penulis agar tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan bapak akan diterima oleh Allah SWT dan semoga limpahan rahmat serta karunia-Nya selalu tercurahkan kepada bapak baik di dunia maupun di akhirat kelak.
4. Terima kasih Ibu Dr. Ari Darmasuti, M.A. selaku dosen pembahas yang selalu mampu memberikan pengetahuan baru, masukan, serta kritik yang sangat bermanfaat baik dalam proses perkuliahan maupun dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan ibu akan diterima oleh Allah SWT dan semoga limpahan rahmat serta karunia-Nya selalu tercurahkan kepada ibu, baik di dunia maupun di akhirat kelak.
5. Ketua jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, Bapak Drs. R.Sigit Krisbintoro, M.IP. beserta Seluruh dosen dan staf, terima kasih atas bantuan serta ilmu-ilmu yang diberikan sehingga mampu menjadi jendela wawasan bagi penulis di masa kini dan di masa yang akan datang. Semoga segala

kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak dan ibu baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

6. Seluruh informan penelitian yang telah mendukung penulis dalam menyusun skripsi ini. Bapak Sukiran, Ibu Gita Yudianingsih, Bapak Busyairi, Bapak Dedy Hermawan, Bapak Asrian Hendi Caya, dan Saudara Ahmad Mufid. Terima kasih atas kesediannya memberikan waktu serta tenaga untuk menjadi informan dalam skripsi ini, semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak-bapak semua baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
7. Sahabatku M. Gerry Zada Alem, Al Araaf Yusuf, Meriyantika Eka Fithri, Elyta, Ulfa Umayasari, Shohib Abdul Aziz, Andri Agung Saputra, dan Eliyas Yahya. Sahabat Penulis yang selalu bersama dalam susah maupun senang. Semoga kita selalu bersahabat bahkan sampai berkeluarga nanti.
8. Kawan-kawan angkatan 2014 yang telah sama-sama berjuang, maaf tidak bisa menyebutkan satu-persatu. Terima kasih atas segalanya selama 4 tahun masa kuliah ini. Semoga kita semua akan selalu diberikan kemudahan serta kesuksesan dalam berkarir nanti.
9. Terakhir, terima kasih kepada Goenawan Mohamad, yang salah satu *tweet*-nya, mampu menginspirasi penulis ditengah kebuntuan saat proses penyusunan skripsi ini.

Bandar Lampung, 12 September 2018

Theo Reynol Sandy



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
<b>II. TINJAUAN TEORITIK</b>	
A. Demokrasi .....	15
1. Budaya Demokrasi.....	15
2. Unsur budaya demokrasi.....	16
3. Demokrasi dan HAM.....	17
4. Elit Dalam Kebebasan Berserikat dan Berkumpul. ....	18
B. Civil Society .....	25
1. Konsep <i>Civil Society</i> .....	25
2. <i>Civil Society</i> -Kebebasan Berserikat dan Berkumpul. ....	28
3. Posisi <i>Civil Society</i> Dalam Demokrasi .....	30
C. Perilaku <i>Uncivil Civil Society</i> .....	33
D. <i>Civil Disobedience</i> .....	34
E. Kerangka Pikir.....	36
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	40
B. Fokus Penelitian .....	41
C. Lokasi Penelitian .....	44

D. Penentuan Informan .....	44
1. Teknik Penentuan Informan.....	44
2. Informan.....	45
E. Jenis Data.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data .....	48
G. Teknik Keabsahan Data .....	48
H. Teknik Pengolahan Data .....	49
I. Teknik Analisis Data .....	50

#### **IV. GAMBARAN UMUM**

A. Apa Itu IDI .....	52
B. Metodologi Dalam Penyusunan IDI.....	54
1. Review Media dan Review Dokumen .....	55
2. Focus Group Discussion (FGD).....	57
3. Wawancara Mendalam.....	57
4. Menentukan Bobot Indikator .....	59
5. Menghitung Indeks tiap-tiap Indikator, Variabel dan Aspek.....	61
6. Skala Kinerja Demokrasi .....	62
C. Manfaat IDI .....	62
D. Sejarah Perkembangan IDI di Lampung .....	63
E. IDI Lampung 2013-2014.....	64
F. IDI Lampung 2016 .....	64
1. Perkembangan IDI Lampung 2016.....	64
2. Perkembangan Indeks-Indeks IDI lampung 2016.....	66
3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Lampung. ....	66

#### **V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Menurunnya Kebebasan Berserikat dan Berkumpul. ....	68
1. Kronologi Kejadian.....	72
2. Siapa Yang Salah? .....	76
3. Analisis Permasalahan Berdasarkan Norma Demokrasi.....	80
4. Catatan Subtantif Terkait IDI.....	89
4.1. Menyoal Metodologi IDI .....	95
4.2. Peserta Pengukuran Yang Cenderung Elitis .....	96
4.3. FGD Sebagai Pilihan Yang Terbatas .....	97
4.4. Sentralisasi Lokasi Pengukuran .....	98
4.5. Konsep Dasar Demokrasi Yang Digunakan Dalam IDI .....	99
5. Perhitungan Skor Kebebasan Berserikat dan Berkumpul.....	101
B. Dampak Dari Permasalahan. ....	105
Dampaknya Secara Psikologis Bagi para Aktivis Mahasiswa.....	105
C. Upaya Yang Telah Dilakukan Pemerintah.....	107
Catatan Dalam Penerapan Hasil IDI di Provinsi Lampung .....	110
1.1. Integrasi setengah hati.....	110
1.2. Lemahnya Keterjangkauan Akar Rumput.....	113
1.3. Homogenisasi Standar.....	115
1.4. Belum optimalnya Kelompok Kerja (Pokja) IDI.....	117

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan .....	120
B. Saran.....	123

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Skor Per-Variabel Pada IDI Lampung, 2015-2016.....	6
2. Daftar Pertanyaan Secara Umum Beserta Informan .....	47
3. Tabel Bobot Penilaian Juri Ahli dengan Menggunakan AHP.....	104

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Perkembangan Skor IDI Lampung 2012-2016 .....	3
2. Perkembangan Aspek-Aspek Pada IDI Lampung, 2009-2016 .....	4
3. Pranata Sosial Dan Hubungannya Dengan Demokrasi.....	32
4. Bagan Kerangka Pikir .....	39
5. Operasionalisasi Dari Empat Metode Pengumpulan Data..... Dalam Penyusunan IDI	59
6. Grafik Perkembangan Skor IDI Lampung 2009-2016.....	65
7. Perkembangan Indeks Variabel IDI Lampung, 2015-2016.....	67



## DAFTAR SINGKATAN

AHP	: <i>Analytical Hierarchy Procedure</i>
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPS	: Badan Pusat Statistik
CSO	: <i>Civil Society Organization</i>
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FEB	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
IDI	: Indeks Demokrasi Indonesia
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
Kesbangpol	: Kesatuan Bangsa dan Politik
KPUD	: Komisi Pemilihan Umum Daerah
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
Ormas	: Organisasi Masyarakat
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
Pokja	: Kelompok Kerja
SBI	: Seni Budaya Islam
SP	: Surat Peringatan
UIN	: Universitas Islam Negeri
UKM	: Unit Kegiatan Mahasiswa
UNDP	: <i>United Nation Development Program</i>
UUD	: Undang-Undang Dasar
WIB	: Waktu Indonesia Barat

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para Pendiri Negara Indonesia (*The Founding Fathers*) melalui UUD 1945 (yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945) telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) menganut paham atau ajaran demokrasi, dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dengan demikian berarti juga NKRI tergolong sebagai negara yang menganut paham Demokrasi Perwakilan (*Representative Democracy*).

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

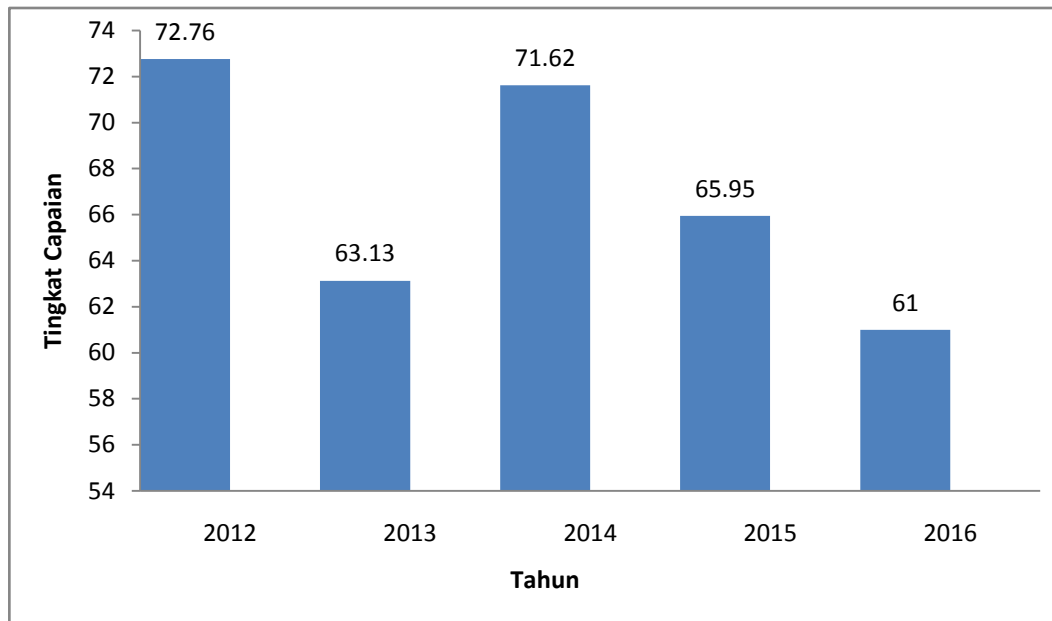
Selain dari itu Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam penjelasan

mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu: (1). Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). (2). Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (Kekuasaan yang tidak terbatas) (Batang tubuh UUD RI 1945).

Berdasarkan dua istilah *rechtsstaat* dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945, adalah demokrasi konstitusional. Di samping itu corak khas demokrasi Indonesia, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (Budiardjo, 1988).

Pada konteks Indonesia, demokrasi tidak bisa dilepas dari dua sisi di atas yaitu substansi dan prosedur, yakni prosedur sebagai cara untuk mencapai substansi sehingga keduanya tidak saling menegasikan, serta berjalan sendiri-sendiri. Demokrasi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika substansi dan prosedur berjalan beriringan.

Indonesia melihat demokrasi sebagai pintu keluar dari jeratan tekanan dan terlihat paling pantas untuk diterapkan karena sesuai dengan semangat HAM dan tidak mendiskreditkan segala bentuk pemikiran dari masyarakatnya. Demokrasi mulai menemukan momentumnya pada saat orde baru runtuh, dan dinamika pertumbuhannya terus berlanjut hingga saat ini.



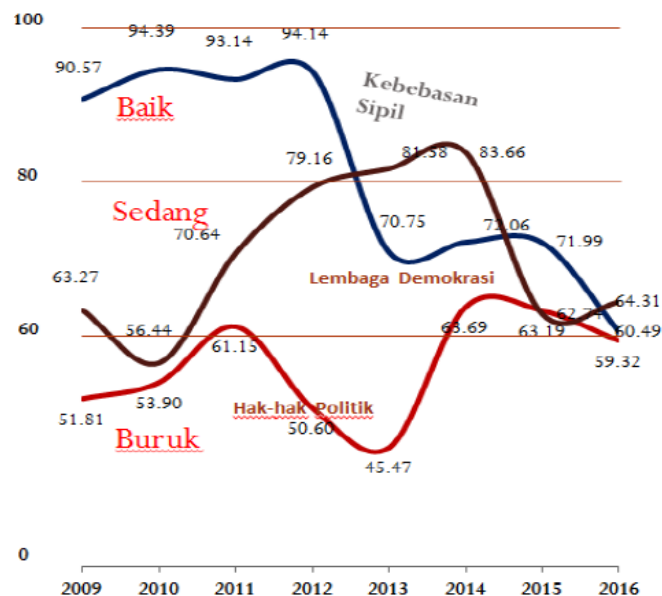
Sumber: Diolah peneliti

**Gambar 1: Perkembangan Skor IDI Lampung 2012-2016**

Bagi suatu negara yang sudah berani menyatakan dirinya sebagai negara yang menerapkan demokrasi, atau dengan kata lain melakukan demokratisasi, harus bersiap menghadapi konsekuensinya, yaitu dituntut harus siap mengembangkan sistem yang digunakannya tersebut menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Demokratisasi, harus dipahami sebagai sebuah proses, bukan hasil.

Perkembangan demokrasi di Indonesia, salah satunya dapat dilihat dari perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang melihat perkembangan demokrasi di Indonesia secara umum, lalu kemudian terbagi lagi ke dalam sub-sub indeks untuk setiap provinsi. Di Provinsi Lampung sendiri, Indeks Demokrasinya, yang terhimpun dalam Indeks

Demokrasi Indonesia (IDI) Lampung, dalam 4 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, walaupun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2014 (mendapat skor 63.13 pada 2013 menjadi 71,62 pada 2014), namun setelahnya terus mengalami penurunan yang cukup signifikan pada 2 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2015 yang mendapat skor 65,95, turun 5,67 poin, kemudian pada tahun 2016 mendapat skor 61, turun 4,95 poin dari tahun 2015.



Sumber: Badan Pusat Statistik

**Gambar 2: Perkembangan Aspek-Aspek Pada IDI Lampung, 2009-2016**

Pada grafik di atas, terlihat aspek kebebasan sipil, sebagai salah satu aspek terpenting dalam demokrasi, terus mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir, ini mengindikasikan bahwa aspek kebebasan sipil di Provinsi Lampung sedang menghadapi ancaman, padahal masyarakat sipil yang aktif adalah salah satu pilar demokrasi yang kuat.



Sejalan dengan apa yang disampaikan dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Lampung 2016, aspek kebebasan sipil di Lampung jika kita dilihat sekilas memang sedang mengalami gejolak, mulai dari kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan oleh pemerintah, yang berdasarkan catatan LBH Bandar Lampung, setidaknya sejak 2013 terjadi kecenderungan peningkatan kekerasan terhadap wartawan, pembubaran secara sepihak kelompok-kelompok tertentu yang dinilai sesat, pembubaran demo dengan kekerasan oleh aparat, sampai pada larangan bagi mahasiswa untuk berdemo ke Jakarta oleh kapolda Lampung (<https://news.detik.com/berita/d-3350912/> kapolda – Lampung – siapkan – maklumat – larang – warga – demo – ke – Jakarta -2-desember, diakses pada 9 februari 2018, pukul 15.30 WIB).

**Tabel 1: Skor Per-Variabel Pada IDI Lampung, 2015-2016**

No	Nama Variabel	2015	2016	Selisih
1	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	100.00	23.44	-76.56
2	Kebebasan Berpendapat	17.35	31.24	13.89
3	Kebebasan Berkeyakinan	75.95	64.73	-11.22
4	Kebebasan dari Diskriminasi	73.70	74.53	0.83
5	Hak Memilih dan Dipilih	76.39	76.64	0.25
6	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	50.00	42.00	-8.00
7	Pemilu yang Bebas dan Adil	100.00	100.00	0.00
8	Peran DPRD	50.17	55.07	4.90
9	Peran Partai Politik	35.71	48.57	12.86
10	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	34.88	45.13	10.25
11	Peran Peradilan yang Independen	100.00	81.25	-18.75

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tabel di atas terlihat yang paling drastis mengalami penurunan nilai pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Lampung ,khususnya pada aspek kebebasan sipil adalah variabel kebebasan berserikat dan berkumpul. Penurunan sangat drastis terjadi, yaitu 76.56 poin, dari sebelumnya yang mendapatkan nilai sempurna, yaitu 100. Kemudian juga terjadi penurunan pada variabel kebebasan berkeyakinan, walaupun tidak separah pada variabel kebebasan berserikat dan berkumpul

Banyak pihak yang menyalahkan pemerintah, sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini. Namun penyebab penurunan itu bukan hanya berkaitan dengan kinerja pemerintahan, perkembangan demokrasi juga sangat tergantung dengan perilaku masyarakat yang menjadi aktor demokrasi itu sendiri (Huntington, 1991).

Berbicara mengenai kebebasan sipil, terutama pada aspek kebebasan berserikat dan berkumpul, tentu tidak bisa terlepas dari dua *domain* yaitu pemerintah dalam hal ini aparat pemerintah serta masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh *Civil Society Organization (CSO)*, yang merupakan aktor terdepan dalam memperjuangkan aspek ini. Dalam penelitian ini penulis akan melihat penyebab menurunnya kebebasan berserikat dan berkumpul di Provinsi Lampung melalui dua perspektif, yaitu pemerintah dan masyarakat atau jika dalam hal kebebasan berserikat dan berkumpul diwakili oleh *civil society*.

Peran politik *Civil Society* tersebut tidak hanya menjadi aktor yang dapat memfasilitasi proses demokratisasi dan mempertahankan demokrasi di suatu negara, tetapi juga organisasi *Civil Society* bisa menjadi perusak dalam proses demokratisasi tersebut (Sugeng, 2005).

Terdapat dua arus pemikiran utama para ahli mengenai peran *Civil Society*, yang *pertama*, akademisi pendukung kebebasan seutuhnya dari *Civil Society*. *Civil Society* yang dipahami sebagai segala bentuk kehidupan sosial yang terorganisir dan terbuka bagi semua kalangan, menganut prinsip sukarela, dan tumbuh secara mandiri merupakan inti dari demokrasi karena tanpa *Civil Society* yang tumbuh secara subur, maka demokrasi tidak bakal dapat dipertahankan (Putnam, 1996).

*Kedua*, akademisi pendukung peran negara yang kuat berpendapat bahwa kebebasan dan demokrasi yang sedang berkembang hanya akan menghasilkan konflik dan korupsi. Perkembangan demokrasi

mengandaikan aturan hukum yang tegas dan kapasitas negara yang kuat serta didukung oleh para penguasa dominan yang tercerahkan (Edward dan Jack, 2007).

Lebih lanjut, sakralisasi terhadap konsep *Civil Society* dapat menjebak kita ke dalam keyakinan berlebihan akan potensi *Civil Society*; dan pada saat bersamaan melupakan keterbatasan *Civil Society*. Ketika kita mengasosiasikan *Civil Society* dengan demokrasi, maka kita mengabaikan kekuatan-kekuatan tertentu di dalam masyarakat seperti kaum ekstrimis, fanatis, milisi dan preman yang mau tidak mau merupakan bagian dari *Civil Society* yang berpotensi untuk mengganggu proses demokratisasi dan bahkan membuat konsolidasi menjadi sulit dicapai (Hadiwinata, 2006).

Penulis menggunakan pandangan para ahli dalam kategori yang kedua, yaitu ahli yang berpandangan untuk tidak mensakralkan *civil society* sebagai dasar pertimbangan utama dalam penelitian ini, selain bertujuan untuk tidak selalu meyalahkan pemerintah, juga menjadi bahan introspeksi diri sendiri sebagai bagian yang secara tidak langsung terwakilkan dalam *civil society*.

Masih sedikit penelitian lanjutan tentang demokrasi khususnya kebebasan berserikat dan berkumpul, yang dilakukan dengan memanfaatkan hasil temuan dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) secara langsung, selama ini penelitian hanya berhenti pada publikasi *review* pemerintah terkait Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tersebut saja, padahal diperlukan penelitian lanjutan untuk menganalisis permasalahan yang ditemukan dalam indeks

tersebut untuk kemudian mencari solusi yang dapat diterapkan agar Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) selanjutnya dapat lebih baik.

Terdapat satu penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim (2017) berjudul “Menakar kedalaman pengukuran demokrasi model Indeks Demokrasi Indonesia (IDI): Beberapa catatan substantif dari Kepulauan Bangka Belitung”. Ibrahim menganalisis permasalahan yang terdapat pada riset IDI berdasarkan pengalamannya mengikuti langsung proses penyusunan IDI.

Fokus riset yang dilakukan oleh Ibrahim di atas adalah pada dua hal mendasar, yakni soal diskursus metodologis dimaksud dan catatan atas pilihan konsolidasi yang diambil untuk mengintegrasikan hasil IDI sebagai basis data dan orientasi pembangunan politik. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi, Ibrahim menemukan bahwa ada persoalan terkait dengan substansi metodologis menyangkut soal teknik pengumpulan data, aspek sebaran sumber data, perbedaan konsep praktis dalam memahami data, sampai pada aspek homogenisasi standard yang cenderung kurang menempatkan keragaman wilayah dengan berbagai karakteristik demografinya

Perbedaan riset yang dilakukan oleh Ibrahim di atas dengan apa yang dilakukan oleh penulis adalah, penelitian Ibrahim berfokus pada aspek metodologis dari IDI sedangkan penulis hendak mencari ada apa dibalik

penurunan tersebut, dampak serta solusi dari permasalahan yang ditemukan dengan memanfaatkan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

Studi selanjutnya yang dilakukan oleh Sugeng (2005) berjudul: *Civil Society: pembangun sekaligus perusak*. Menghasilkan kesimpulan bahwa *Civil Society* ternyata memiliki dua wajah yang berpotensi sekaligus untuk mendukung sekaligus menghancurkan demokrasi. Setelah penulis mendapatkan kesimpulan dari penelitian pertama diatas, bahwa ada kaitan antara perkembangan aspek-aspek demokrasi turut dipengaruhi oleh para aktor di dalamnya.

Melalui temuan dari penelitian Sugeng ini, penulis menarik berargumen bahwa, *Civil Society* sebagai salah satu pihak yang bersinggungan langsung dengan kebebasan berserikat dan berkumpul, tidak selalu berperan positif namun juga negatif. Berangkat dari hal itulah dalam penelitian kali ini penulis berusaha mencari, apakah penyebab sebenarnya dibalik penurunan skor kebebasan berserikat dan berkumpul adalah akibat perilaku negatif dari *Civil Society*.

Studi yang *ketiga* dilakukan oleh Glasius (2010) berjudul: *UnCivil Society*. Dalam studi tersebut, Glasius membahas mengenai penggunaan istilah *Uncivil Society*, baik dalam lingkungan akademik maupun non-akademik. Dalam studi tersebut Glasius mengemukakan beberapa ciri atau kondisi kemunculan dari *uncivil Civil Society*. Misalnya ternyata "*Uncivil Civil Society*", adalah salah satu bentuk masyarakat sipil yang paling mungkin muncul ketika (1) negara terlalu lemah untuk menjamin keamanan fisik

atau material, (2) ekonomi pasar hanya mementingkan *clientelisme*, dan (3) masyarakat politik tidak ada atau terfragmentasi sampai pada titik kehancuran.

Glasius juga mengidentifikasi lingkungan dimana *Uncivil Civil Society* paling mungkin muncul yaitu dengan membalikkan empat kondisi yang oleh Schmitter dibutuhkan untuk mengakui suatu masyarakat sebagai masyarakat sipil. (1) Adanya otonomi ganda dari negara dan pasar, (2) yang dapat menumbangkan kapasitas masyarakat sipil dalam melakukan pertimbangan (3) yang dapat mendorong perumusan negara atau pasar; dan (4) adanya *incivility*, misalnya kurangnya rasa hormat terhadap peraturan dan orang lain di dalam masyarakat sipil. Memanfaatkan kriteria yang dipaparkan dalam studi Glasius tersebut, penulis berusaha mengidentifikasi perilaku *uncivil* dari *Civil Society*.

Walaupun sudah banyak penelitian serupa berkaitan dengan permasalahan demokrasi yang telah dilakukan, namun bukan berarti penelitian mengenai demokrasi menjadi kurang penting, justru semakin penting, karena demokrasi sejatinya adalah hal yang rumit, maka perlu banyak perhatian untuk membuatnya berkembang.

Dalam penelitian ini penulis cenderung condong kepada pemikiran para akademisi yang berpandangan untuk tidak mengkultuskan peran *Civil Society*, oleh karena karena itu penulis mengajak untuk melihat fenomena ini dari perspektif lain, jangan selalu menyalahkan pemerintah sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dibalik menurunnya

kebebasan berserikat dan berkumpul dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 terutamanya di Provinsi Lampung, masyarakat, utamanya *Civil Society* juga perlu mengintrospeksi diri, karena perilaku masyarakat sebagai aktor, juga mempengaruhi perkembangan demokrasi itu sendiri.

Berdasarkan permasalahan diatas, menurunnya kebebasan berserikat dan berkumpul dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Lampung 2016, kontras dengan pemberitaan-pemberitaan di media *mainstream*, dimana permasalahan, terutama berkaitan dengan kebebasan sipil secara umum, banyak terjadi di DKI Jakarta, lihat saja kasus penistaan agama, Pembubaran HTI dan lain-lain. Namun penurunan yang cukup tinggi justru terjadi di Provinsi Lampung, yang nampak cukup kondusif. Oleh karena itulah penelitian ini menjadi menarik dan sekaligus penting untuk dilakukan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apa alasan sebenarnya dibalik turunnya kebebasan berserikat dan berkumpul dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Lampung 2016?
2. Apa dampak dari permasalahan tersebut?
3. Apa solusi atau upaya yang telah dilakukan pemerintah terkait permasalahan tersebut?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis diatas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menemukan alasan sebenarnya dibalik menurunnya kebebasan berserikat dan berkumpul di Lampung dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Lampung 2016.
2. Kemudian mencari apa dampak dari hal tersebut, terhadap demokrasi di lampung.
3. Menemukan solusi atau upaya yang telah dilakukan pemerintah, berkaitan dengan permasalahan tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil temuan penelitian ini, secara praktis, selain bisa lebih memperkenalkan secara lebih luas mengenai seluk beluk riset IDI beserta permasalahannya kepada masyarakat luas, khususnya kepada para mahasiswa, Juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, dalam merumuskan solusi mengenai permasalahan penurunan IDI lampung 2016 dan untuk Kesbangpol dapat dijadikan pertimbangan dalam memberlakukan organisasi *civil society* selanjutnya.

Diharapkan pula hasil penelitian ini dapat digunakan oleh penelitian lainnya sebagai bahan pijakan, serta memantik penelitian lanjutan dalam ranah kebebasan berserikat dan berkumpul yang berkaitan dengan demokrasi di Provinsi Lampung, yang pada akhirnya akan membuat perkembangan demokrasi di Lampung menjadi lebih pesat.

## **II. TINJAUAN TEORITIK**

### **A. Demokrasi**

#### **1. Budaya Demokrasi**

Demokrasi memiliki pengertian yang beragam , namun dalam konteks ini penulis mengambil satu pengertian dari ahli yang penulis rasa sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan rakyat, karena yang namanya kekuasaan pemerintahan itu melekat kepada diri rakyat atau orang banyak dan hak bagi setiap rakyat atau orang banyak untuk dapat mempertahankan dan bisa mengatur serta dapat melindungi dirinya dari adanya sebuah paksaan yang berasal dari badan atau orang lain yang diserahkan tugas untuk memerintah ( Azra dalam Harris Soche 2006).

Dalam pengertian di atas terlihat bahwa unsur kebebasan khususnya kebebasan dari sebuah paksaan merupakan unsur utama dalam sebuah sistem demokrasi, jika unsur dasar tersebut saja sudah tercederai maka unsur lain kemungkinan tidak akan berjalan dengan baik. Lebih lanjut Menurut Henry B. Mayo sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam

pemilihan-pemilihan berkala serta didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan dilaksanakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. (Budiardjo 1997).

## **2. Unsur budaya demokrasi**

Berikut beberapa unsur budaya demokrasi :

1. Kebebasan, adalah keleluasaan untuk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau melakukan sesuatu yang bermamfaat untuk kepentingan bersama atas kehendak sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. Bukan kebebasan untuk melakukan hal tanpa batas. Kebebasan harus digunakan untuk hal yang bermanfaat bagi masyarakat, dengan cara tidak melanggar aturan yang berlaku.
2. Persamaan, adalah Tuhan menciptakan manusia dengan harkat dan martabat yang sama. Di dalam masyarakat manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, politik, mengembangkan kepribadiannya masing-masing, sama haknya untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Solidaritas, adalah kesediaan untuk memperhatikan kepentingan dan bekerjasama dengan orang lain. Solidaritas sebagai perekat bagi pendukung demokrasi agar tidak jatuh kedalam perpecahan.
4. Toleransi, adalah sikap atau sifat toleran. Toleran artinya bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dll) yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian sendiri.

5. Menghormati Kejujuran, adalah keterbukaan untuk menyatakan kebenaran, agar hubungan antar pihak berjalan baik dan tidak menimbulkan benih-benih konflik di masa depan.
6. Menghormati penalaran, adalah penjelasan mengapa seseorang memiliki pandangan tertentu, membela tindakan tertentu, dan menuntut hal serupa dari orang lain. Kebiasaan memberipenalaran akan menumbuhkan kesadaran bahwa ada banyak alternatif sumber informasi dan ada banyak cara untuk mencapai tujuan.
7. Keadaban, adalah ketinggian tingkat kecerdasan lahir batin atau kebaikan budi pekerti. Perilaku yang beradab adalah perilaku yang mencerminkan penghormatan terhadap dan mempertimbangkan kehadiran pihak lain yang tercermin dalam sopan santun, dan beradab.

### **3. Demokrasi dan HAM**

Demokrasi dan HAM dua hal yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Didalam Negara yang menganut asas Demokrasi kedudukan rakyat sangat penting, sebab didalam negara tersebut rakyatlah yang memegang kedaulatan kepentingan dan hak asasi rakyat diakui dan dilindungi oleh negara, yaitu dengan kata lain negara melindungi Hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusinya, atau kedaulatan adalah kekuasaan yang penuh dan langgeng ada pada masyarakat. Di dalam negara Demokrasi suatu negara dianggap milik

masyarakat karena secara formal negara itu didirikan dengan perjanjian masyarakat (Moh. Mahfud MD. 1999).

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian, bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupan, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi negara Demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.

Sistem demokrasi untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini pada hakekatnya berasal dari filosofis bahwa manusia adalah mahluk yang bebas karena manusia mempunyai hak dan kemampuan untuk mengatur dan menentukan hidupnya sendiri. Dengan demikian hubungannya dengan bernegara, demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat untuk menentukan adanya jaminan terhadap penyelenggaraan negara, serta jaminan dan perlindungan terhadap HAM.

#### **4. Elit Dalam Kebebasan Berserikat dan Berkumpul.**

Untuk memajukan kebebasan sipil, salah satunya kebebasan berserikat dan berkumpul, diperlukan aktor-aktor politik karena, berkaca dari pengalaman di banyak negara, konsolidasi demokrasi tidak bisa terjadi

tanpa dukungan aktor-aktor politiknya terhadap prinsip-prinsip demokrasi (Diamond 1996; Przeworski 1991). Prinsip-prinsip demokrasi adalah seperangkat sikap terhadap gagasan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik, bahwa di dalamnya nilai-nilai kebebasan dan hak-hak kelompok minoritas harus ditegakkan, bahwa warganegara harus berkesamaan kedudukan di depan hukum, dan bahwa kebebasan pers, kebebasan berusaha, hak-hak politik, serta pemilihan umum yang kompetitif harus dilindungi dan terus dikembangkan (Mujani 2007).

Tingkat toleransi yang tinggi diperlukan mengingat demokrasi dibangun di atas kenyataan konflik kepentingan di antara warganegara. Aransemen demokrasi memerantarai konflik tersebut secara damai, tanpa harus menghilangkan perbedaan yang menjadi sumber konflik tersebut. Aransemen ini mensyaratkan aktor-aktor politik yang bersikap toleran terhadap perbedaan dan setuju untuk tidak setuju. Warganegara boleh membenci satu sama lain selama sikap tersebut tidak menghalangi hak orang lain (Sullivan, Piereson, & Marcus 1982).

Karenanya, demi konsolidasi demokrasi, kebijakan yang buruk dari segi perlindungan kebebasan harus ditolak. Demikian, karena politik demokratis tanpa kebebasan sipil akan berkembang menjadi sebuah demokrasi yang iliberal, yang niscaya akan menggerus kesempatan warganegara untuk menikmati kemajuan di banyak bidang kehidupan.

Dalam konteks ini, penting diperhatikan kenyataan bahwa kualitas kebijakan publik yang muncul, yang menyangkut kebebasan sipil, sangat dipengaruhi oleh derajat toleransi politik, baik pada tingkat elit maupun massa (Marcus et. al. 1995; Gibson 1992). Semakin toleran elit dan massa, makin kecil kemungkinan munculnya kebijakan yang intoleran, dan sebaliknya. Tanpa toleransi, perbedaan-perbedaan akan menjadi problematis, karena hal itu berpotensi memicu instabilitas. Karenanya, sekalipun toleransi tidak identik dengan demokrasi, namun aransemen demokratik mensyaratkan toleransi untuk bisa stabil dan bekerja (Sullivan, Piereson, & Marcus 1982).

Yang dimaksud dengan “elite politik” adalah “sekelompok orang yang, karena posisi politisnya yang strategis, dapat membawa perubahan politik secara *reguler* dan *substansial*” (Burton et al 1995: 5). Dengan sumber daya dan kewenangan politik yang ada di tangan mereka, para elite politik adalah pembuat kebijakan utama yang menentukan nasib publik.

Para elite itu membawa pengaruh politik secara “reguler” dalam pengertian bahwa pandangan dan kemungkinan tindakan mereka akan dilihat oleh orang-orang lain sebagai faktor-faktor penting yang harus diperhitungkan ketika menilai kemungkinan perlu diubah atau dipertahankannya sebuah kebijakan publik tertentu. Ini tidak dalam pengertian bahwa elite seperti itu akan memengaruhi setiap kebijakan publik, melainkan bahwa dia dapat melakukan tindakan yang bisa



memengaruhi aspek-aspek yang penting dan menentukan dilihat dari kepentingan dan lokasi keberadaannya.

Sementara itu, para elite itu juga membawa pengaruh politik yang “substansial”. Ini dalam pengertian bahwa tanpa dukungan atau penolakan dan penentangan mereka, sebuah hasil akhir yang penting dilihat dari kepentingan dan lokasi keberadaan mereka bisa jadi amat berbeda atau bertentangan.

Selain karena posisi politik mereka yang strategis, kemampuan elite di dalam memengaruhi hasil akhir kebijakan politik secara reguler dan substansial ini membedakan mereka dari orang-orang atau sektor-sektor lain dalam masyarakat. Seorang pembunuh bayaran bernuansa politis bisa membawa akibat politis yang substansial, tapi itu tak akan pernah terjadi secara reguler. Sebaliknya, seorang warganegara yang tinggi tingkat partisipasi politiknya dan rajin memberi suara dalam pemilu bisa membawa pengaruh yang reguler, tapi pengaruh itu relatif tidak substansial dibanding pengaruh elite politik, karena setiap orang punya potensi yang sama untuk membawa pengaruh yang sama.

Kenyataan bahwa hanya ada sekelompok kecil orang yang memiliki pengaruh politik yang substansial dan reguler, dan karenanya disebut elite politik, adalah sesuatu yang biasa dalam demokrasi. Apa pun kriteria yang diberikan kepada demokrasi, tetap disadari bahwa kekuasaan politik tidak akan sepenuhnya terbagi secara merata;

sekelompok kecil orang akan menikmati kekuasaan politik jauh lebih besar.

Para sarjana berpandangan bahwa hal ini tidak dapat dihindari: hanya sekelompok kecil elite yang secara aktual membuat keputusan, sedang kelompok mayoritas, massa, hanya akan menjalankan keputusan tersebut. Yang tidak disepakati adalah: seberapa jauh kelompok elite itu bertanggungjawab terhadap massa? Bagaimana hubungan di antara kedua kelompok tersebut? Lalu, apa yang harus dilakukan agar elite politik itu didesak untuk terus bertanggung jawab?.

Ada tiga penjelasan teoretis besar di sini. Pertama, teori elitis tentang demokrasi menyatakan bahwa masalah politik sepenuhnya adalah urusan kelompok elite, yang tidak perlu konsultasi apa pun dengan massa. Untuk menjadi pejabat publik, misalnya, diperlukan banyak uang yang tidak dimiliki massa. Kalangan elite tidak bertanggung jawab atau hanya sedikit saja peduli dengan massa.

Pandangan ini disampaikan misalnya oleh Gaetano Mosca, Robert Michels, dan C. Wright Mills. Kedua, teori pluralis tentang demokrasi menyatakan bahwa massa bisa menentukan lewat kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*), yang berfungsi sebagai jalan bagi berlangsungnya demokrasi, dan karenanya pemerintah harus mendengarkan rakyat.

Pendukung teori ini misalnya menyatakan bahwa tidak semua presiden Amerika Serikat berasal dari keturunan yang kaya raya (seperti Geoge

Bush II dan John F. Kennedy); ada juga presiden yang berasal dari petani atau rakyat biasa, seperti Jimmy Carter atau Bill Clinton. Penjelasan ketiga disebut teori poliarki (*poliarchy*), yang dikemukakan oleh Robert Dahl.

Penjelasan ketiga ini dapat disebut sebagai sintesis dari kedua teori yang sudah disebutkan di atas: tidak hanya ada satu piramida (semacam kelompok kepentingan, seperti dikatakan teori pluralis), tetapi beberapa dan bermacam-macam, yang masing-masingnya memang kemungkinan besar dikuasai oleh elite-elite tertentu berikutnya (seperti dikemukakan teori elitis); ada interaksi di antara unit-unit politik (teori pluralis), tetapi juga ada stratifikasi orang sebagai pemimpin dan pengikut (teori elitis).

Dalam rumusan Dahl, *poliarchy* artinya: “*the rule of the leaders of several groups who have reached stable understanding with each other*” (aturan yang ditetapkan oleh pemimpin sejumlah kelompok yang sudah mencapai kesepakatan yang mapan di antara satu dengan yang lainnya). Selain oleh pertimbangan-pertimbangan di atas itu, terdapat dua kemungkinan penting yang kerap dinyatakan dalam studi-studi tentang konsolidasi demokrasi.

Pertama bahwa, dalam konteks teori elitis tentang demokrasi, cukup kuat pandangan yang menyatakan bahwa intoleransi dalam sikap dan perilaku masyarakat yang terbelah secara primordial bisa mengancam keberlangsungan demokrasi jika ia terjadi pula pada level elite politik.

Seperti kita tahu, Indonesia adalah bangsa dengan komposisi masyarakat yang terbelah seperti itu.

Dan kedua, yang juga merisaukan dilihat dalam konteks konsolidasi demokrasi di Indonesia, kecenderungan elite yang akomodatif terhadap tuntutan massa yang intoleran justru lebih cenderung terjadi pada tingkat lokal daripada nasional (Gibson & Bingham 1984). Alasan mengapa tingkat toleransi elite nasional dan elite lokal berbeda adalah karena elite nasional lebih terbiasa menghadapi lingkungan dengan tuntutan dan kepentingan massa yang beragam ketimbang elite lokal (ibid; Sullivan et. al. 1993).

Akar dari persoalan di atas adalah sejauh mana massa yang intoleran berpengaruh dalam isu pembuatan kebijakan publik. Studi Gibson (1988; 1989) menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki pengaruh. Tetapi ini tampaknya hanya berlaku sejauh massa yang intoleran tersebut pasif dari segi partisipasi politik. Jika mereka menjadi aktif, pada gilirannya mereka bisa membahayakan demokrasi. Lebih dari itu, dan yang tak kalah penting, sekalipun mungkin lebih punya komitmen kepada nilai-nilai demokrasi, para elite tetaplah makhluk politik yang seringkali bersikap oportunistis dan bersedia menggunakan segala cara untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka.

Jika mayoritas massa berkarakter intoleran menuntut kebijakan publik yang intoleran (walaupun hampir selalu dengan klaim berbau paternalistis atau moralistis seperti “untuk kebaikan masyarakat” atau

“untuk menegakkan akhlak”), maka hampir bisa dipastikan sulit bagi para elite untuk berperilaku seperti malaikat.

## **B. Civil Society**

### **1. Konsep *Civil Society***

Perez Diaz menekankan makna *Civil Society* pada keadaan masyarakat yang telah mengalami pemerintahan yang terbatas, kebebasan, ekonomi pasar, dan timbulnya asosiasi-asosiasi masyarakat yang mandiri, dimana satu sama lainnya saling menopang. Ada pula pandangan *Civil Society* sebagai sebuah masyarakat yang memiliki peradaban (*civility*) yang dibedakan dari masyarakat yang tidak beradab atau barbarian.

Istilah *Civil Society* pertama kali diperkenalkan oleh Adam Ferguson seorang pemikir dari Skotlandia, sejak saat itu diperbincangkan dalam diskursus politik dalam mencari bentuk masyarakat yang ideal. Dengan menempatkan *Civil Society* dalam kerangka demokrasi maka pengertian *Civil Society* dipahami sebagai penegakan nilai-nilai demokrasi (Yusron, 2009).

Dengan demikian agenda untuk membangun *Civil Society* termasuk menciptakan ruang gerak bagi komponen masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan hidup guna mencapai kesejahteraan tanpa penindasan baik fisik maupun sistemik.

Oleh karena itu, *Civil Society* merupakan suatu bentuk hubungan antara negara dengan sejumlah kelompok sosial, misalnya keluarga, kalangan bisnis, asosiasi masyarakat, dan gerakan-gerakan sosial yang ada dalam negara, namun sifatnya independen terhadap negara. Itulah yang disebut dengan *Civil Society*. (Eisenstadt dalam Lipset, 1995). Jadi, *Civil Society* adalah sebuah masyarakat, baik secara individual maupun secara kelompok dalam negara yang mampu berinteraksi dengan negara secara independen.

Menurut perspektif A.S Hikam, *Civil Society* merupakan wacana yang berasal dari Barat dan lebih mendekati substansinya apabila tetap disebutkan dengan istilah aslinya tanpa diterjemahkan dengan istilah lain atau tetap berpedoman dengan konsep de' Tocquville merupakan wilayah sosial terorganisir yang mempunyai ciri-ciri antara lain : Kesukarelaan (*Voluntary*), Keswasembadaan (*self-generating*), Keswadayaan (*self supporting*), serta kemandirian tinggi berhadapan dengan Negara dan keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.

Jadi *Civil Society* menurut AS Hikam adalah wilayah- wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikanantara lain kesukarelaan, keswasembadaan dan keswadayaan, kemandirian tinggi terhadap negara dan keterkaitan dengan norma serta nilai hukum yang diikuti warganya (Widjojo. 1999).

*Civil Society* yang disebut masyarakat madani sebagaimana dikonsepsikan para pelopornya memiliki tiga ciri utama adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu- individu dan kelompok – kelompok dalam masyarakat utamanya ketika berhadapan dengan negara, adanya ruang publik bebas ( the free public sphere ) sebagai wahana dari keterlibatan politik secara aktif warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik. Adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis (Sufyanto. 2001).

Menurut AS Hikam *Civil Society* sebagaimana dikonsepsikan oleh para pemikirnya mempunyai 3 ciri khusus yaitu :

1. Kemandirian yang cukup tinggi dari individu –individu dan kelompok dalam masyarakat
2. Adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga Negara demi kepentingan publik.
3. Adanya kemampuan membatasi kuasa Negara agar tidak intervensionis dan otoriter.

*Civil Society* dikonsepsikan secara teoritis merupakan masyarakat yang bebas, dari ketergantungan terhadap Negara dan pasar *self reliance* (percaya diri), *self supporting* ( swasembada), *voluntary* ( sukarela dan taat akan nilai dan norma yang berlaku. bebas dari ketergantungan negara dan pasar).

Kebebasan yang dimaksud sebagai suatu bentuk kebebasan dari masyarakat untuk melakukan aktivitas kemasyarakatan( sosial, budaya, politik dan agama ) tanpa adanya intervensi Negara dan pasar, intervensi Negara terhadap masyarakat di bolehkan jika terjadi ketidakadilan dalam khidupan bermasyarakat dan bernegara aturan main di langgar atau undang undang tidak di tegakkan. Dalam *Civil Society* swasembada adalah kemampuan melakukan sesuatu tanpa adanya ketergantungan

## **2. *Civil Society*-Kebebasan Berserikat dan Berkumpul.**

Partisipasi politik di era demokrasi hari ini tidak dapat sepenuhnya terlepas dari kontribusi masyarakat sipil baik dalam kehidupan sehari-hari tata kelola pemerintahan atau pembangunan, juga sangat terasa pada saat kegiatan suksesi kekuasaan atau kepemimpinan baik di level lokal maupun nasional. Hubungan antara masyarakat sipil dan demokrasi itu sama seperti hubungan antara keberadaan borjuasi dan demokrasi itu sendiri sebagaimana adagium Barrington Moore, '*no bourgeoisie no democracy*'. Sehingga, dapat dikatakan juga, kehadiran demokrasi tanpa partisipasi aktif masyarakat sipil hanya menjadi demokrasi yang dangkal—demokrasi yang lebih berat di prosedur ketimbang substansi demokrasi itu sendiri: kesetaraan, kebebasan, keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan, serta tak dapat dipungkiri bagi negara yang baru menerapkan demokrasi aktor yang terlibat aktif dalam berpartisipasi adalah para elit, dan para elit ini membutuhkan



ruang untuk bergerak yang dinamakan kebebasan berserikat dan berkumpul.

Transisi politik yang diarahkan kepada tahap konsolidasi demokrasi dapat dilakukan oleh rezim penguasa (Share, 1987) atau oleh masyarakat sipil (Huntington, 1991), dan atau kolaborasi keduanya. Dalam hal keberhasilan mengelola transisi kepada konsolidasi ditentukan oleh kemunculan 'elit yang bersatu secara konsensual' dengan satu komitmen bersama terhadap aturan main demokrasi, yaitu seperangkat norma tentang aturan tingkah laku politik, dan struktur interaksi yang memupuk keakraban dan kepercayaan antar individu (Burton, Gunther, & Highley, 1992).

Tidak bisa dipungkiri, demokrasi yang bermakna musti membutuhkan kondisi-kondisi awal yang memadai guna terwujudnya demokratisasi itu sendiri, yaitu: (1) adanya pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala; (2) kebebasan berpendapat; (3) adanya akses ke sumber-sumber informasi yang luas dan alternatif; (4) adanya otonomi asosiasional; (5) adanya lembaga perwakilan; dan (6) hak warganegara yang inklusif (Dahl, 1999).

Lain dari itu, sistem politik yang demokratis pada hakikatnya memerlukan tiga prinsip dasar sebagai institusionalisasi demokrasi itu sendiri, seperti: pertama, tegaknya etika dan moralitas politik sebagai landasan kerja sistem politik, ekonomi, dan sosial dalam horison bernegara dan berbangsa. Kedua, tegaknya prinsip konstitusionalisme

secara tegas, melalui pelaksanaan (dan kepatuhan) terhadap supremasi hukum di masyarakat. Dan terakhir, ketiga, diberlakukan dan dilaksanakannya mekanisme akuntabilitas publik, yakni mekanisme yang memosisikan semua pemegang jabatan publik sebagai pemegang amanat dari warga masyarakat sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya (Agustinus, 2006).

### **3. Posisi *Civil Society* Dalam Demokrasi**

Kebaradaan aktor non-negara dalam rentang sejarah negara-negara tidak semua mengandung konotasi positif. Banyak catatan sejarah yang memberikan stereotype negative terhadapnya, misalnya, sebagai kelompok anarkis atau oposisi. Keterlibatan gerakan kritis masyarakat sipil sangat beragam yang mengakibatkan mereka harus vis a vis negara yang cukup beresiko.

Sementara definisi yang positif atau netral semakin meluas hari ini. Organisasi masyarakat sipil (disebut juga NGO, atau *Civil Society Organization/CSO*) didefinisikan sebagai kelompok-kelompok asosiasi yang berfungsi mengerem kekuasaan negara, menjadi perantara aspirasi masyarakat kepada negara, dan merupakan kelembagaan sosial yang saling berinteraksi internal dan eksternal yang dapat menjadi pendukung dan penghambat kerja-kerja negara (Chazan, 2003).

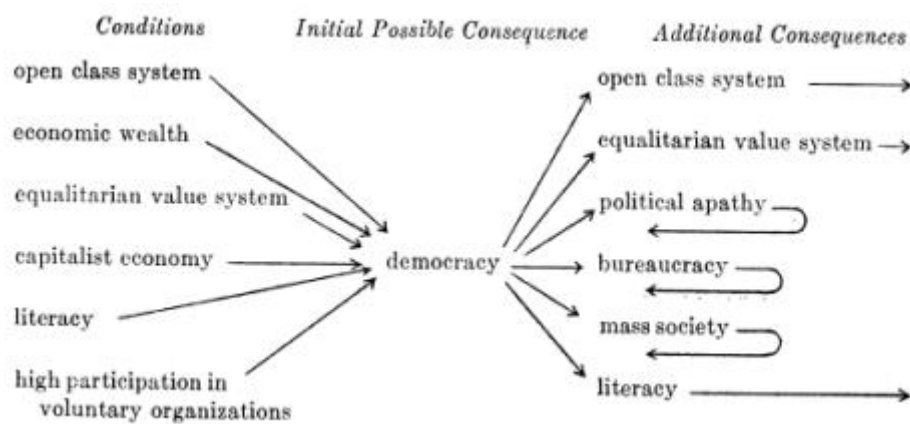
*Civil Society* sendiri secara luas dimengerti sebagai prasyarat bekerjanya sistem demokrasi (Pridham, 2000). Hal ini sesuai dengan

temuan Demos bahwa aktor-aktor pro-demokrasi cenderung aktif dalam berbagai organisasi masyarakat sipil (Tornquist, 2005). Schmitter mempunyai pendapat sebaliknya yaitu akibat segmentasi dan eksklusivisme kelompok *Civil Society* dapat menghambat konsolidasi demokrasi itu sendiri.

Olle Tornquist sendiri tidak melihat otomasi kelompok masyarakat sipil mendukung ‘proyek’ demokratisasi padahal untuk mewujudkan demokrasi bermakna tidak cukup aktivisme kelompok masyarakat sipil saja. Demokrasi bermakna mensyaratkan beberapa hal antara lain: kesetaraan, kapasitas negara dan kelompok masyarakat sipil/individu dalam tata kelola alokasi sumber daya kehidupan. Dengan demikian, entitas masyarakat sipil, pasar, dan negara dapat hidup berdampingan secara damai—dengan menempatkan posisi secara proporsional dan saling ada penghargaan untuk memastikan demokrasi itu sendiri tidak menegasikan keberadaan entitas lain.

Di zaman demokrasi, kekuatan *Civil Society* yang mandiri dapat bekerja lintas kelas dan mampu menjadi ‘pengerem’ tendensi intervensionis yang dilakukan negara (Cohen dalam Hikam, 1996). Negara mempunyai watak ‘memaksakan kehendak’ ini merupakan keadaan obyektif yang tidak terhindarkan—negara sebagai satu-satunya lembaga yang secara sah dapat menggunakan kekerasan dalam rangka menegakkan ‘ketertiban’ menurut rasionalitasnya (Weber, 1978).

Tidak dapat dipungkiri bahwa kapitalisme menumbuhkan *Civil Society* berbasis kelas dan dapat mempromosikan demokrasi liberal (Lipset, 1959). Tentu saja, bukan tanpa konsekuensi. Lipset memberikan gambaran kompleksitas bagaimana bekerjanya pranata sosial dan hubungannya dengan demokrasi sebagaimana bagan di bawah ini:



Sumber: Lipset, 1959

### Gambar 3: Pranata Sosial dan Hubungannya Dengan Demokrasi

Dalam lajur condition di atas memperlihatkan elemen-elemen masyarakat sipil yang mempunyai potensi besar mendorong bekerjanya demokrasi (tengah). Namun hal ini harus didukung oleh bekerjanya konsekuensi terhadap perubahan-perubahan keadaan yang bertentangan dengan demokrasi seperti sistem sosial tertutup, birokrasi yang kaku untuk mengarah pada sistem yang lebih membuka ruang bekerjanya elemen non-negara.

Jika gayung tidak bersambut, maka demokrasi akan mengalami involusi dan dalam jangka panjangnya akan mengakibatkan apa yang disebut

‘*democracy deficit*’ atau keadaan terburuknya, mengarah pada, ‘*political decay*’ (Huntington, *Political Development and Political Decay*, 1965. Fukuyama, 2016).

### C. Perilaku *Uncivil Civil Society*

*Civility* masyarakat sipil, *civility* negara dan pasar saling bergantung. Oleh karena itu, masyarakat sipil hanya bisa bersikap sipil sesuai keadaan. Nardo Avritzer dalam Glasius (2010), misalnya, mengemukakan "*uncivil Civil Society*", adalah salah satu prototipe masyarakat sipil yang paling mungkin muncul ketika (1) negara terlalu lemah untuk menjamin keamanan fisik atau material, (2) ekonomi pasar hanya mementingkan *clientelisme*, dan (3) masyarakat politik tidak ada atau terfragmentasi sampai pada titik kehancuran.

Demikian pula, teori whitehead “*social location Civil Society is weak or absent*” atau ciri suatu lingkungan sosial dimana *civil societnya* lemah atau bahkan tidak ada sama sekali, yaitu dengan membalikkan empat kondisi yang oleh schmitter dibutuhkan untuk mengakui suatu masyarakat sebagai masyarakat sipil. (1) Adanya otonomi ganda dari negara dan pasar, (2) yang dapat menumbangkan kapasitas masyarakat sipil dalam melakukan pertimbangan (3) yang dapat mendorong perumusan negara atau pasar; dan (4) adanya *incivility*, misalnya kurangnya rasa hormat terhadap peraturan dan orang lain di dalam masyarakat sipil (Glasius.2010; 1587).

#### **D. *Civil Disobedience***

Berbeda dengan ‘militer’, yang diwajibkan untuk patuh, warga sipil punya hak untuk menolak, atau lebih dikenal dengan istilah *Civil Disobedience*. Hugo Adam Bedau dalam bukunya *Civil Disobedience in Focus* (2002) berpendapat bahwa pembangkangan warga berarti tidak mematuhi hukum dengan alasan yang tepat atau tidak baik merupakan persoalan lama setua kisah klasik Yunani Kuno tentang pembangkangan Prometheus terhadap Zeus yang sengaja dilakukan agar sang dewa memberikan api kepada manusia. Terlepas dari faktor historis yang dengan jelas memperlihatkan pembangkangan terhadap hukum yang berlaku, sikap tidak mematuhi hukum itu sendiri merupakan isu politik kontroversial. Penolakan terhadap hukum bagi masyarakat politik merupakan taruhan yang sangat berbahaya karena mengancam otoritas Negara secara langsung yang dapat berujung pada instabilitas berkepanjangan.

*Civil Disobedience* selalu dipahami sebagai pembangkangan terhadap Negara. Sehingga apabila seseorang tidak setuju dengan hukum yang berlaku, maka ia dapat menyikapi hukum dengan 3 (tiga) kemungkinan sikap yaitu *pertama*, subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum namun tetap diam dan tidak menyatakan ketidaksetujuannya. Takut akan hukuman atau rasa tidak nyaman atas kritik dari pihak lain sering kali menjadi alasan untuk bersikap diam terhadap hukum yang tidak adil. *Kedua*, subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum namun setelah menyuarakan ketidaksetujuannya. Hal ini tidak bisa disebut sebagai *Civil*

*Disobedience* karena tidak ada tindakan melawan hukum selain pernyataan ketidaksetujuan. *Ketiga*, subjek menolak untuk mematuhi hukum, tetapi tetap menyembunyikan ketidaksetujuannya sehingga tidak diketahui publik.

Thoreau menegaskan bahwa manusia kalau pada akhirnya mematuhi hukum itu karena ia memahami bahwa hukum itu benar atau adil oleh karena manusia memiliki suara hati. Sedangkan John Rawls memandang *Civil Disobediensce* sebagai kewajiban natural untuk menegakkan keadilan. Oleh karena ada kemungkinan pembangkangan sebagai ungkapan sikap peduli pada hukum yang adil itulah maka kita harus berhati-hati dalam menilai masyarakat sipil telah bertindak anarkhis.

Ada 3 kondisi utama menurut Raws sebagai pembenaran atas gerakan pembangkangan yaitu pertama, apabila *Civil Disobedience* dipahami sebagai gerakan politik yang ditujukan pada rasa keadilan komunitas, maka pantas kalau gerakan ini dibatasi pada berbagai hal yang dipandang tidak adil. Kedua, *Civil Disobedience* dapat dibenarkan ketika berbagai upaya yang dilakukan dengan kehendak baik untuk memperbaiki keadaan tidak mendapatkan respons yang baik dari penguasa. Ketiga, *Civil Disobedience* sebetulnya lebih merupakan tuntutan prinsip rasa keadilan, khususnya yang menyatakan bahwa setiap orang dalam situasi yang sama harus mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi pembangkangan terhadap hukum baru dibenarkan apabila terjadi ketidakadilan serius. *Civil Disobedience* ini ada oleh karena merupakan salah satu kewajiban moral politik.

## E. Kerangka Pikir

Sorotan utama dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 ini khususnya untuk Provinsi Lampung adalah penurunan drastis yang terjadi pada aspek kebebasan sipil khususnya pada kebebasan berserikat dan berkumpul. Kebebasan berserikat dan berkumpul, dalam riset IDI, dipengaruhi oleh dua hal, pemerintah dan masyarakatnya sendiri (Bealey, 2000). Berdasarkan Indeks data Demokrasi Lampung 2016, penurunan skor kebebasan berserikat dan berkumpul pada indeks tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan ancaman/kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun jangan terburu-buru mengambil kesimpulan bahwa pemerintah telah bertindak diktator/represif, karena pemerintah dapat pula bertindak demikian guna mempertahankan kewibawaannya atas tindakan masyarakat yang melampaui batas (R Abimanyu dalam Elsam 2017).

Jika berbicara tentang masyarakat, dalam kaitannya dengan kebebasan berserikat dan berkumpul tentunya tidak bisa terlepas dari *Civil Society* sebagai yang paling terwakili jika berbicara mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun kita tidak boleh mengkultuskan *Civil Society* sebagai sesuatu yang sempurna tanpa cela, karena telah banyak ahli yang berpendapat justru *Civil Society* sendiri yang merusak demokratisasi lewat perilaku *uncivil* (Sugeng 2005).

Perilaku *uncivil* tersebut tidak akan terlepas dari peran para elite atau aktor yang terlibat di dalamnya, beberapa asumsinya adalah;



- 1) *Pertama*, pada periode transisi menuju demokrasi, pola interaksi antara *state* dan *society* lebih merupakan interaksi antara elite penguasa (*state actor*) dan elite masyarakat (*society actor*) (Gismar, A.M; Hidayat 2010).
- 2) *Kedua*, kualitas kebijakan publik yang muncul, yang menyangkut kebebasan berserikat dan berkumpul, sangat dipengaruhi oleh derajat toleransi politik, baik pada tingkat elite maupun massa (Marcus et. al. 1995; Gibson 1992).
- 3) *Ketiga*, perkembangan demokrasi ditentukan oleh bagaimana para aktor /elite mengaktualisasikan kapasitas politik mereka untuk memanfaatkan peluang-peluang demokratisasi yang tersedia dan mengatasi masalah-masalah yang muncul (WP Samadhi 2015).
- 4) Dan *keempat*, adalah karena suatu konsolidasi demokrasi tidak bisa terjadi tanpa dukungan aktor-aktor politiknya terhadap prinsip-prinsip demokrasi (Diamond 1996; Przeworski 1991).

Ditambah dengan faktor lingkungan sosial tempat *Civil Society* tersebut berada, turut mempengaruhi sikap *uncivil* dari *civil society* asumsinya adalah, *Civility* masyarakat sipil, *civility* negara dan pasar saling bergantung. Oleh karena itu, masyarakat sipil hanya bisa bersikap sipil sesuai keadaan. Nardo Avritzer dalam glasius (2010), misalnya, mengemukakan "*uncivil Civil Society*" paling mungkin muncul ketika ;

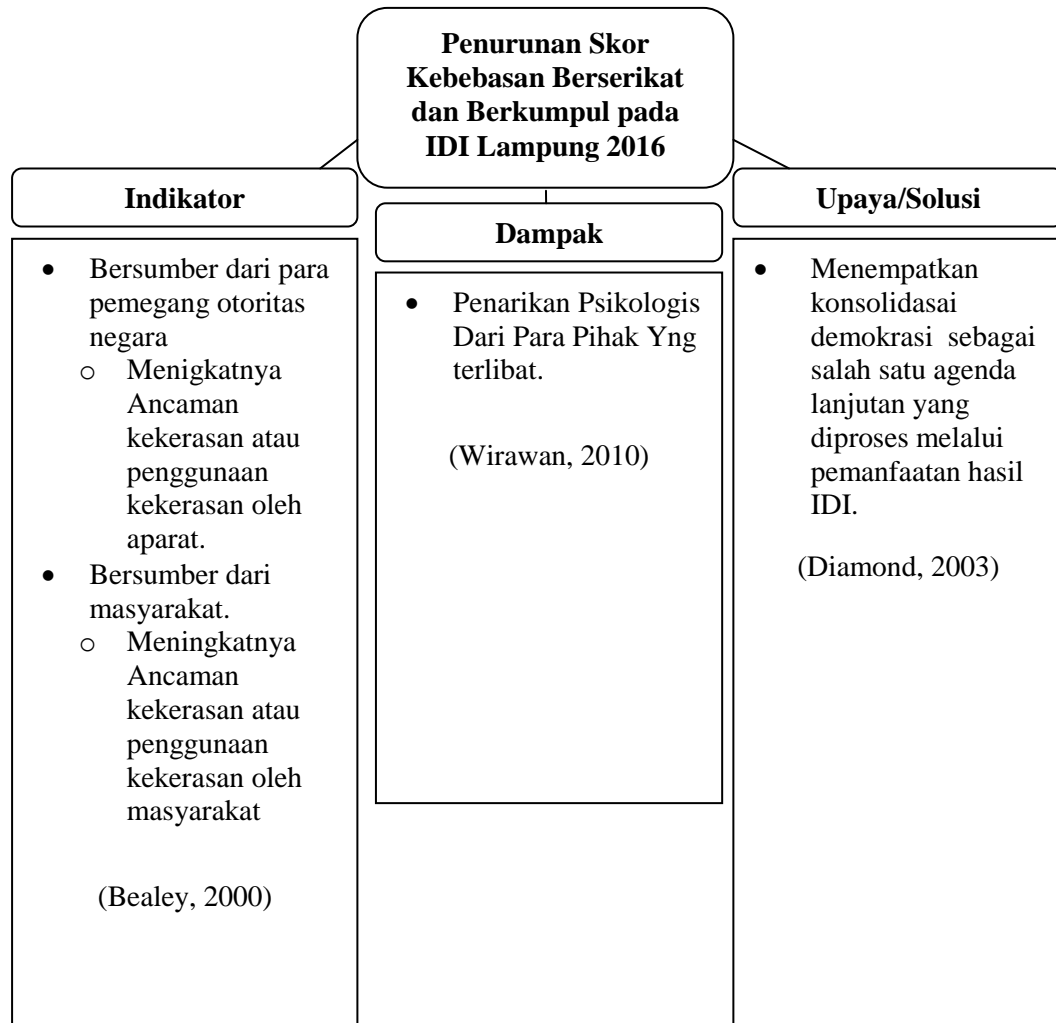
- 1) Negara terlalu lemah untuk menjamin keamanan fisik atau material,
- 2) Ekonomi pasar hanya mementingkan klientelisme, dan

3) Masyarakat politik tidak ada atau terfragmentasi sampai pada titik kehancuran

Untuk itulah penulis menarik kesimpulan sementara bahwa penyebab, meningkatnya ancaman/penggunaan kekerasan oleh pemerintah, yang kemudian berimbas pada menurunnya skor kebebasan berserikat dan berkumpul pada IDI Lampung 2016 ternyata merupakan respon pemerintah guna mempertahankan kewibawaannya atas perilaku *uncivil* dari *Civil Society*, yang sangat dipengaruhi oleh elitnya.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam permasalahan ini adalah dengan menempatkan *mindset* bahwa demokrasi adalah sesuatu yang harus diperjuangkan menjadi *mindset* utama dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintahan dan karenanya harus menempatkan konsolidasi demokrasi sebagai salah satu agenda lanjutan yang diproses melalui pemanfaatan hasil IDI (Diamond, 2003)

Alasan dibalik penurunan serta upaya dari permasalahan ini berpusat pada ranah elite, begitu pula dampaknya juga berimbas pada elit, khususnya para aktivis mahasiswa, karena menurut Wirawan (2009) dampak dari permasalahan tersebut dapat berimbas pada penarikan secara psikologis dari para aktor yang terlibat, yakni para aktivis mahasiswa.



**Gambar 4: Bagan Kerangka Pikir**

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Kajian tentang menurunnya kebebasan berserikat dan berkumpul pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Lampung 2016 ini, akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, metode ini dianggap tepat karena dapat menguraikan fenomena permasalahan kebebasan berserikat dan berkumpul di Lampung secara lebih jelas dan jika temuannya diubah menjadi angka-angka atau data statistik seperti pada pendekatan kuantitatif, maka esensi atau inti permasalahan akan hilang serta tidak akan tergambar dengan jelas, baik mengenai latar belakang dibalik menurunnya kebebasan berserikat dan berkumpul pada IDI Lampung 2016, apa dampaknya maupun apa solusi atau upaya yang telah dilakukan terkait permasalahan tersebut.

Karena menurut Robert bogdan (1992) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data dekriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri. Pendekatan ini langsung menunjukkan setting dan individu-individu dalam setting itu secara keseluruhan subyek penelitian, baik berupa organisasi

ataupun individu, tidak dipersempit menjadi variabel yang terpisah atau menjadi hipotesis, melainkan dipandang sebagai bagian dari suatu keseluruhan.

Oleh karena itulah penulis memilih menggunakan metode kualitatif karena dengan metode ini penulis dapat mengetahui perilaku serta cara pandang obyek penelitian secara mendalam yang tidak bisa diwakili dengan angka-angka statistik, serta dengan penelitian kualitatif memungkinkan penulis untuk menyelidiki konsep-konsep yang dalam pendekatan lain intinya akan hilang.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus pada penelitian ini adalah mencari alasan sebenarnya dibalik meningkatnya ancaman/ tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga menyebabkan menurunnya kebebasan berkumpul dan berserikat, kemudian menemukan apa dampaknya terhadap kehidupan demokrasi di Provinsi Lampung serta apa solusi/upaya yang tepat untuk dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi permasalahan tersebut. *Pertama*, kemungkinan alasan sebenarnya dibalik menurunnya kebebasan kebebasan berserikat dan berkumpul pada IDI Lampung 2016, menurut Bealey (2000) adalah sebagai berikut:

1. Berasal dari negara:

Meningkatnya ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah.

2. Berasal dari masyarakat:

Meningkatnya ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat.

Indikator-indikator di atas sebenarnya juga digunakan oleh pemerintah dalam merumuskan IDI, namun penulis beranggapan bahwa pembagian indikator tersebut masih terlalu luas, tidak menjelaskan alasan sebenarnya dibalik menurunnya kebebasan berserikat dan berkumpul tersebut, untuk itulah penulis kemudian membagi lagi ke dalam sub-sub, yang disusun dengan menggabungkan beberapa teori/pendapat yang saling memiliki keterkaitan, adapun sub-sub tersebut adalah:

1. Berasal dari negara:

Meningkatnya ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah.

- a. Pemerintah yang semakin represif (Bealey, 2000).
- b. Pemerintah hanya berusaha berusaha mempertahankan kewibawaannya (R Abimanyu dalam Elsam 2017)

2. Berasal dari masyarakat:

Meningkatnya ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat.

- a. Negara terlalu lemah untuk menjamin keamanan fisik atau material (Glasius, 2010).
- b. Perilaku dari masyarakat sipil yang melampaui batas (*uncivil*) (Hadiwinata, 2005).

*Kedua*, dampak yang mungkin terjadi akibat penurunan kebebasan berserikat dan berkumpul tersebut adalah berupa Penarikan psikologis pihak yang terlibat konflik (Wirawan, 2009).

*Ketiga* Upaya/Solusi yang mungkin dapat/telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini menurut Diamond (2003) adalah dengan menempatkan konsolidasi demokrasi sebagai agenda lanjutan utama yang diproses melalui pemanfaatan hasil IDI. Dapat dilakukan dengan cara:

1. Dengan membuat kebijakan yang berfokus untuk memperbaiki aspek-aspek dengan skor paling buruk berdasarkan hasil IDI pada tahun tersebut.
2. Dengan membangun kepanikan yang sama jika terjadi penurunan skor IDI sama halnya dengan kepanikan yang terjadi jika yang mengalami penurunan adalah pertumbuhan ekonomi.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan mengambil lokasi wawancara di Kota Bandar Lampung. Pengambilan lokasi ini mungkin tidak merepresentasikan cakupan lokasi pengukuran IDI yang seharusnya dilakukan di seluruh kabupaten di Provinsi Lampung, namun pemilihan lokasi tersebut dipertimbangkan mengingat hampir seluruh informan dalam penelitian ini bertempat di Kota Bandar Lampung.

### **D. Penentuan Informan**

#### **1. Teknik Penentuan Informan**

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan ditentukan dengan teknik *Purposive sampling*, yakni proses penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2012)

Adapun kriteria dasar dalam penentuan informan dalam penelitian ini adalah:

1. Dapat menjelaskan fenomena terkait kebebasan berserikat dan berkumpul.
2. Terlibat dalam kelompok kerja (Pokja) yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Lampung No: G/280/II.03/HK/2016 tentang



Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung.

3. Unsur Pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas) dan perguruan tinggi yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kebebasan sipil.

## **2. Informan**

Adapun informan yang telah penulis tentukan berdasar kriteria di atas adalah sebagai berikut:

- I. Kepala seksi statistik ketahanan sosial, BPS Provinsi Lampung, Gita Yudianingsih Informan dipilih karena keterkaitannya secara langsung dalam proses penyusunan IDI Lampung 2016 dari awal hingga akhir serta kemungkinan mengetahui siapa saja pihak-pihak yang terlibat lainnya.
- II. Kepala sub-bidang pemerintahan, Bappeda Provinsi Lampung, Busyairi. Informan dipilih karena tupoksinya terkait perencanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang tengah diteliti.
- III. Kepala bidang politik dalam negeri, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Lampung, Sukiran. Informan dipilih terkait terkait tupoksinya yang berhubungan langsung dengan kebebasan berserikat dan berkumpul, utamanya kepada organisasi masyarakat sipil

- IV. Akademisi FISIP Universitas Lampung, Dedy Hermawan  
Informan dipilih karena kompetensinya dalam melihat fenomena demokrasi di Provinsi Lampung.
- V. Pengurus UKM SBI UIN Raden Intan, Ahmad mufid. Dipilih sebagai pihak yang ikut terlibat langsung dalam penyebab penurunan kebebasan berserikat dan berkumpul, terutama yang berkaitan dengan UKM SBI.

**Tabel 2: Daftar Pertanyaan Secara Umum Beserta Informan**

Pertanyaan secara umum	Informan Dari Pemerintah	Informan Dari Masyarakat Sipil
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siapa saja yang terlibat dalam perumusan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Lampung 2016?</li> <li>• Bagaimana pandangan informan terkait permasalahan penurunan aspek kebebasan sipil pada Indeks tersebut?</li> <li>• Siapa yang paling bertanggung jawab menurunnya skor aspek kebebasansipil pada IDI Lampung 2016?</li> <li>• Apakah penyebabnya berasal dari pemerintah?</li> <li>• Apakah disebabkan oleh masyarakat sendiri?</li> <li>• Apa implikasinya terhadap kehidupan demokrasi di lampung?</li> <li>• Apa solusi dari permasalahan tersebut menurut informan?</li> <li>• Apa saja tindakan yang telah dilakukan pemerintah terkait permasalahan tersebut?</li> </ul>	Kepala seksi statistik ketahanan sosial, BPS Provinsi Lampung, Gita Yudianingsih	Akademisi FISIP Universitas Lampung, Sekaligus anggota Pokja IDI, Dedy Hermawan
	Kepala sub-bidang pemerintahan, Bappeda Provinsi Lampung, Busyairi	Pengurus UKM SBI UIN Raden Intan, Ahmad mufid
	Kepala bidang politik dalam negeri, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Lampung, Sukiran	

## **E. Jenis Data**

Terdapat dua data yang mendukung penelitian ini, penulis membaginya menjadi dua berdasarkan sumbernya yang menurut Sugiyono (2012), yaitu:

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung baik dari wawancara kepada para informan, maupun observasi partisipatif yang penulis lakukan.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang penulis dapatkan melalui media baik dokumen ataupun media cetak .

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang utama adalah wawancara secara langsung dengan para informan, yang kemudian diperkuat dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang tersedia, baik dari surat kabar cetak maupun elektronik, hasil penelitian, jurnal, dan sumber-sumber sekunder lainnya.

## **G. Teknik Keabsahan Data**

Untuk mengecek keabsahan data yang didapat, peneliti menggunakan teknik *triangulasi*, yaitu *triangulasi* sumber, *triangulasi* metode, serta *triangulasi* teori, dilakukan dengan membandingkan dan mengecek balik

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu, alat dan teori yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 1987). Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil wawancara dari para informan dengan pengamatan yang penulis lakukan saat mengikuti FGD IDI
- b. Membandingkan data hasil wawancara dengan para informan dengan data dokumen dan berita-berita dari surat kabar terkiat.
- c. Membandingkan pendapat informan satu dengan informan lain dari latar belakang yang berbeda.
- d. Membandingkan teori *Uncivil Civil Scoiety* dengan toeri *Civil Disobedience* dalam menganalisis permasalahan antara pemerintah dengan pihak mahasiswa

## **H. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah dengan mengolah data tersebut. Teknik pengolahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### **1. Editing**

Menurut Burhan Bungin (2010: 144) editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan. Pada tahapan ini penulis dari para informan memeriksa kembali data kelengkapan jawaban, kejelasannya, dan relevansinya atau kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan untuk kemudian dipisahkan.

## 2. Interpretasi Data

Tahap interpretasi data yaitu tahap untuk memberikan penafsiran atau penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban dari informan dengan hasil yang lain, serta dari dokumentasi yang ada.

### **I. Teknik Analisis Data**

Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa.

Proses analisis data kualitatif melalui proses sebagai berikut :

#### 1. Reduksi Data

Pada tahapan ini dilakukan proses pengurangan data atau dalam arti yang lebih luas adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

#### 3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Pada tahap ini dilakukan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat padat dan mudah

dipahami, serta dilakukan dengan berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

## IV. GAMBARAN UMUM

### A. Apa Itu IDI

Indeks demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. IDI merupakan pengukuran yang *country specific*; yang dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial-politik Indonesia. oleh karena itu, dalam merumuskan konsep demokrasi maupun metode pengukurannya IDI memepertimbangkan kekhasan persoalan Indonesia.

Secara makro, kekhasan yang dimaksud antara lain terkait dengan realitas demokrasi di Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dari dinamika pergeseran relasi antara negara dan masyarakat para periode pasca soeharto. paling tidak ada dua karakteristik utama dari praktik demokrasi dalam pusran pergeseran pola relasi antara negara dan masyarakat (State-society relation) pada periode pasca soeharto tersebut. *Pertama*, telah terjadi perluasan peran masyarakat (society). Namun demikian, perluasan peran masyarakat ini lebih banyak merefleksikan kontestasi kepentingan antar-elit. *Kedua*, reformasi kelembagaan demokrasi telah dilakukan secara masif, tidak saja dalam bentuk memperbaiki struktur dan fungsi dari



lembaga-lembaga yang telah ada, tetapi juga menghadirkan sejumlah lembaga baru. Namun demikian, reformasi kelembagaan tersebut belum banyak memberikan kontribusi terhadap pemenuhan "janji demokrasi" karena belum didukung oleh perilaku demokrasi yang inheren dari ranah masyarakat, maupun negara. koinsidensi antara dua karakteristik dasar di atas, selanjutnya disadari atau tidak, telah membuat kondisi gerakan demokratisasi justru ke arah pendulum "kontra-demokrasi".

Dengan mempertimbangkan aspek teoritis dan empiris sebagaimana dikemukakan di atas serta aspek-aspek teknis penyusunan indeks, maka terdapat empat prinsip dasar penyusunan IDI. *Pertama*, IDI hanya mengukur perkembangan demokrasi politik di provinsi. Fokus kepada demokrasi politik ini sama sekali tidak menafikan, misalnya, pentingnya aspek ekonomi sebagai bagian penting dari demokrasi. Namun dalam pengukuran ini sesuai dengan kebutuhan praktis pada saat ini yang menjadi sorotan adalah demokrasi politik. Selain itu, indikator-indikator yang dapat dijadikan ukuran keadilan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat telah cukup tersedia dalam berbagai data statistik (seperti angka kemiskinan, angka pengangguran, IPM, rasio gini, dan sebagainya). *Kedua*, IDI hanya mengindikasikan potret demokrasi di Provinsi; bukan suatu studi etnografis yang sangat detil yang ditujukan untuk memberikan gambaran secara utuh dan lengkap mengenai demokrasi provinsi. Dalam hal ini, IDI dapat diumpamakan sebagai sketsa yang memberikan gambaran yang cukup akurat, tidak dilebih-lebihkan dan tidak pula dikurang-kurangkan sehingga mengalami distorsi. *Ketiga*, IDI mengukur

demokrasi dari dua sisi, yaitu sisi negara (pemerintah) dan masyarakat. pada konteks inilah, variabel dan indikator IDI tidak saja diarahkan pada upaya 'merekam' kinerja kelembagaan demokrasi (*structure*), tetapi juga kinerja perilaku dari para pelaku demokrasi (*agencies*) yang terlibat, baik dari ranah masyarakat maupun negara. *Keempat*, IDI bukan merupakan tujuan akhir tetapi merupakan tujuan antara untuk merealisasikan kehidupan masyarakat yang bebas, aman, adil dan sejahtera. untuk mencapai hal ini, IDI diharapkan menjadi rujukan baik dalam melakukan kajian-kajian akademis maupun dalam memformulasikan kebijakan dan program pembangunan politik. terkait dengan formulasi kebijakandan pembangunan politik, IDI memang harus dikaitkan dengan tindak lanjut yang konkrit.

## **B. Metodologi Dalam Penyusunan IDI**

IDI menggunakan metode triangulasi (Denzin, 1978), yakni mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi silang (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain. Sehubungan dengan itu, ada empat metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu: Review Media (analisis isi berita surat kabar), Review Dokumen (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah), *Focus Group Discussion* (FGD), dan Wawancara Mendalam (*in-depth Interview*).

## 1. Review Media dan Review Dokumen

Review media dan dokumen dipilih sebagai salah satu teknik pengumpulan data, karena baik media maupun dokumen dianggap sebagai sumber informasi paling realistis untuk mendapatkan data kuantitatif (dalam kurun waktu pengamatan selama satu tahun) berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI. Penggunaan dokumen sebagai sumber data IDI tidak menuntut banyak penjelasan. Karena pada dasarnya, dokumen resmi merupakan sumber data yang layak dan biasa dipakai dalam banyak penelitian. Penggunaan media – khususnya koran, sebagai sumber data untuk mengukur demokrasi barangkali tidak lazim digunakan, sebab itu perlu mendapatkan penjelasan khusus.

Surat Kabar (Koran) diyakini sebagai sumber informasi yang paling relevan dalam merekam kehidupan daerah – termasuk di dalamnya denyut demokrasi atau proses demokratisasi, selama satu tahun secara terus menerus dari hari ke hari. Ini bukan berarti koran tidak memiliki kelemahan. IDI sepenuhnya menyadari keterbatasan koran seperti kemungkinan bias-bias editorial dan wartawan, keterbatasan jangkauan liputan, keterbatasan ruang, dan keterbatasan keahlian wartawan. Namun, di samping keterbatasan-keterbatasan ini dan dengan asumsi koran di Indonesia adalah koran yang bebas, koran merupakan sumber data mengenai demokrasi provinsi yang cukup baik. Terlebih lagi, dalam hal-hal yang berkaitan dengan gairah spontan dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik di daerahnya, barangkali

tidak ada yang konsisten hadir sepanjang tahun seperti koran. Untuk mengurangi bias yang muncul karena kelemahan-kelemahan yang inheren ada dalam metode *review* koran inilah maka FGD dan wawancara mendalam juga dilakukan.

Untuk menerapkan metode *review media* dan *document*, tulis Neuman (2000: 34), sedikitnya harus dipenuhi empat persyaratan pokok. *Pertama*, merumuskan secara spesifik isu yang akan dicari (dalam konteks IDI berarti mulai dari aspek, variabel, hingga indikator penelitian). *Kedua*, menetapkan jenis media dan dokumen yang akan di-review. *Ketiga* menyusun alat atau sistem untuk “merekam” data dan informasi yang diperlukan. *Keempat* mengukur data dan informasi yang tela terkumpul untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk angka atau persentase. Dalam konteks penyusunan IDI persyaratan yang pertama merujuk pada aspek, variabel, dan indikator IDI. Sedangkan untuk memenuhi syarat yang kedua, ditetapkan media yang dimaksud adalah surat kabar, dan untuk ini telah dipilih satu surat kabar terkemuka di masing-masing provinsi. Sementara untuk jenis dokumen, yang digunakan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan DPRD –seperti Peraturan Daerah (Perda), Surat Keputusan Gubernur, Surat Keputusan DPRD serta dokumen resmi lainnya seperti data demonstrasi dari Kepolisian, dan data pemilih yang dikeluarkan oleh KPUD.

## **2. Focus Group Discussion (FGD)**

Mengingat proses pengumpulan data dalam penyusunan IDI menggunakan lebih dari satu metode –dan di antara metode-metode tersebut review media dan dokumen merupakan basis untuk menjaring data kuantitatif, maka dengan demikian FGD memiliki peranan penting dalam upaya untuk meminimalkan “bias” dari informasi yang dijarah melalui review media dan dokumen. Secara umum, tujuan utama dari penggunaan FGD adalah untuk menjaring data kualitatif berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI. Secara khusus, tujuan FGD dalam pengumpulan data IDI adalah, pertama, untuk mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang telah berhasil dikumpulkan melalui review media dan dokumen. Kedua, melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi terhadap indikator IDI. Ketiga, menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui review media dan review dokumen.

## **3. Wawancara Mendalam**

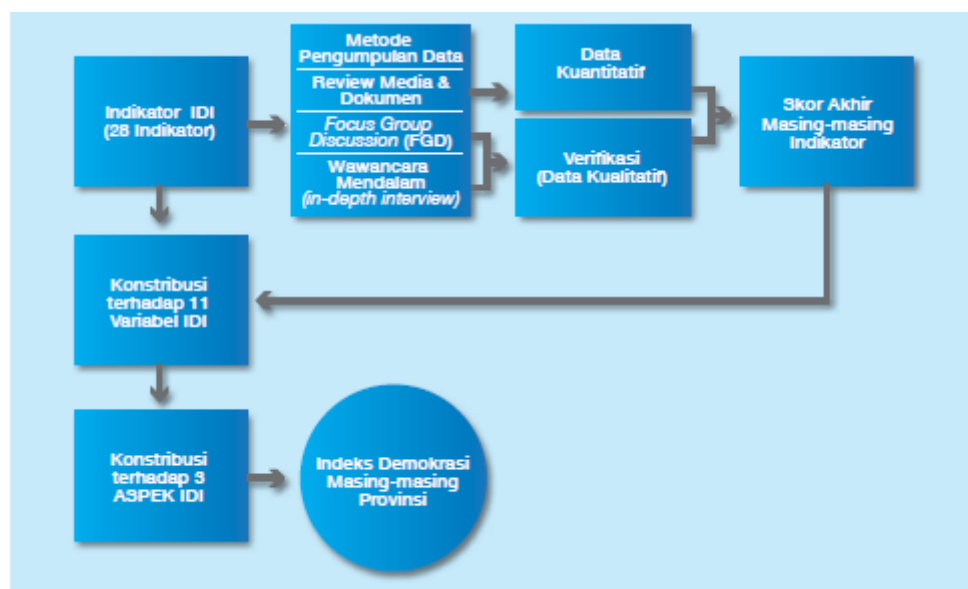
Pada konteks penyusunan IDI, in-depth interview digunakan untuk melakukan verifikasi dan pendalaman informasi yang telah diperoleh melalui review media dan dokumen serta FGD. Karena itu, cukup beralasan jika in-depth interview diperankan bukan sebagai metode

utama dalam proses pengumpulan data, tetapi lebih bersifat komplementer karena melengkapi ketiga metode lainnya. Dengan peran seperti ini, in-depth interview baru dilakukan setelah FGD berlangsung guna mendalami berbagai informasi terkait kasus-kasus yang belum terungkap secara maksimal dalam FGD. Perlu ditegaskan di sini, kendati in-depth interview bersifat komplementer terhadap metode pengumpulan data lainnya, namun memiliki peran yang tidak kalah penting karena berperan sebagai “pos” terakhir dalam penjaringan data kualitatif. Lebih dari itu, in-depth interview juga berperan sebagai “filter” dalam mengurangi bias informasi berkaitan dengan aspek, variabel dan indikator IDI.

Keterkaitan empat metode di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Dua metode pertama (review media dan dokumen) berperan sebagai basis utama dalam penjaringan data kuantitatif berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI. Selanjutnya, data-data kuantitatif yang telah terekam melalui review media dan dokumen diverifikasi dan dielaborasi dengan data kualitatif yang dijaring melalui dua metode berikutnya (FGD dan in-depth interview).

Dengan demikian, penghitungan indeks untuk masing-masing indikator IDI ditetapkan dengan bertumpu pada data kuantitatif yang diperoleh melalui dua metode yang pertama (review media dan review dokumen) serta data kualitatif yang diperoleh melalui dua metode berikutnya (FGD dan in-depth interview). Indeks masing-masing indikator IDI di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks

variabel IDI, selanjutnya indeks variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Pada akhirnya, komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Secara singkat, operasionalisasi dari empat metode pengumpulan data dalam penyusunan IDI, dapat digambarkan pada Diagram.



**Gambar 5: Operasionalisasi Dari Empat Metode Pengumpulan Data Dalam Penyusunan IDI**

#### 4. Menentukan Bobot Indikator

Variabel dan Aspek Aspek-aspek Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Lembaga-lembaga Demokrasi belum tentu memiliki kontribusi atau tingkat kepentingan yang sama dalam menentukan perkembangan demokrasi di Indonesia. Ketiganya memang penting, namun seberapa

penting salah satu aspek relatif terhadap aspek yang lain tidak dapat diketahui. Hal demikian juga terjadi pada tingkat variabel dan indikator; sejauh mana kontribusi atau tingkat kepentingannya terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia tidak kita ketahui.

Memang bobot ini bisa secara teoritis ditentukan, misalnya dengan mengasumsikan bahwa setiap aspek memiliki kontribusi yang sama. Namun, penentuan secara *a priori* ini belum tentu sesuai dengan realitas ataupun sesuai dengan bagaimana secara empirik para akademisi dan praktisi demokrasi yang terlibat dalam upaya membangun demokrasi di Indonesia memahaminya. Dihadapkan pada masalah di atas, IDI memilih untuk menentukan bobot—yang dalam bahasa statistik yang lazim digunakan di Indonesia disebut penimbang—melalui suatu proses terpisah menggunakan *Analytical Hierarchy Procedure* (AHP). AHP merupakan pendekatan metodologis untuk menentukan prioritas di antara sejumlah kriteria yang kompleks, dengan mengandalkan penilaian ahli. Penilaian ahli dilakukan dengan melakukan perbandingan secara berpasangan (*pair ways comparison*) antar indikator penilaian. Dalam hal ini, IDI menggunakan 14 penilai ahli dalam AHP mewakili akademisi, politikus, masyarakat sipil dan tersebar secara cukup merata dalam hal gender.



## 5. Menghitung Indeks tiap-tiap Indikator, Variabel dan Aspek

Proses pengolahan data hasil review surat kabar dan review dokumen hingga menghasilkan indeks indikator diawali dengan penghitungan data kuantitatif menjadi skor data kuantitatif. Selanjutnya, skor data kuantitatif dipadukan dengan data kualitatif hasil FGD dan wawancara mendalam sehingga akhirnya menghasilkan indeks indikator. Kontribusi indeks indikator dalam membentuk indeks variabel kemudian ditimbang menggunakan penimbang indikator yang didapat melalui suatu proses terpisah yang disebut *Analytical Hierarchy Procedure*. Penimbang ini menentukan berapa kontribusi masing-masing indikator terhadap variabel di mana indikator tersebut menjadi salah satu komponennya. Indeks variabel kemudian menyumbang kepada indeks aspek. Dalam proses pembentukan skor aspek setiap variabel ditimbang menggunakan penimbang hasil AHP. Indeks aspek pada akhirnya menyumbang kepada Indeks Demokrasi Indonesia. Berdasarkan angka-angka indeks yang dihasilkan maka dapat diketahui kategori demokrasi di suatu provinsi, rendah, menengah atau tinggi.

Berbeda dengan skor aspek IDI provinsi yang dibentuk dari skor aspek variabel, skor aspek IDI Indonesia diperoleh dari rata-rata tertimbang capaian skor aspek provinsi-provinsi di Indonesia. Setelah diperoleh skor aspek Indonesia, kemudian ditimbang dengan penimbang yang diperoleh dari AHP maka terbentuklah IDI Indonesia.

## **6. Skala Kinerja Demokrasi**

Untuk menggambarkan capaian kinerja demokrasi di setiap provinsi, digunakan skala 1 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi. Kinerja terendah (nilai indeks = 1) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 1). Sebaliknya, kinerja tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi (skor 5). Selanjutnya untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks antarprovinsi yang dihasilkan, skala 1 – 100 di atas dibagi ke dalam tiga kategori kinerja demokrasi, yaitu “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

### **C. Manfaat IDI**

Sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, disesuaikan dengan ciri keindonesiaan, jadi IDI sangat cocok dalam mengukur perkembangan demokrasi di Indonesia. Keberadaan IDI sangat bermanfaat guna membantu pemerintah dan Pemerintahan Daerah di dalam menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik.

Dengan demikian, IDI sesungguhnya bukanlah alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah karena komponen yang membentuk indikator variabel dan aspek IDI tidak saja mengukur lingkup bidang tugas pemerintah semata, tetapi pada saat yang bersamaan juga mengukur geliat demokrasi yang tumbuh di masyarakat. (Djoko Suyanto, 2010).

#### **D. Sejarah Perkembangan IDI di Lampung**

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terlaksana atas prakarsa dari *United Nations Development Program* (UNDP) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Riset IDI Lampung dilakukan pertama kali sejak tahun 2009, berbarengan dengan seluruh provinsi di Indonesia.

Secara umum perkembangan skor IDI lampung sejak pertama kali diluncurkan, pernah mengalami dua kali peningkatan yang cukup signifikan, pertama terjadi pada tahun 2010 menuju 2011, yang mengalami peningkatan lebih dari 6 poin, kemudian peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2013 menuju tahun 2014 yang mengalami kenaikan lebih dari 8 poin.

## **E. IDI Lampung 2013-2014**

Perkembangan IDI Lampung sempat mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2013 menuju 2014 dan merupakan peningkatan tertinggi dalam sejarah IDI Lampung (2009-2016). Secara umum skor mengalami peningkatan sebanyak delapan poin lebih, dari 63.13 pada tahun 2013 menjadi 71.62 pada tahun 2014, dari yang tadinya pada tahun 2013 mendekati kategori buruk, kemudian menjadi mendekati kategori baik pada tahun 2014.

Begitu pula perkembangan tiap-tiap aspek dari IDI Lampung pada tahun 2013-2014, utamanya aspek kebebasan sipil juga mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan, kurang dari dua poin, dari yang awalnya mendapat skor 70.75 pada tahun 2013 menjadi 72.06 pada tahun 2014, peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan pada variabel kebebasan berpendapat, yaitu meningkat sebanyak 6.68 dari yang tadinya mendapat skor 0 pada tahun 2013.

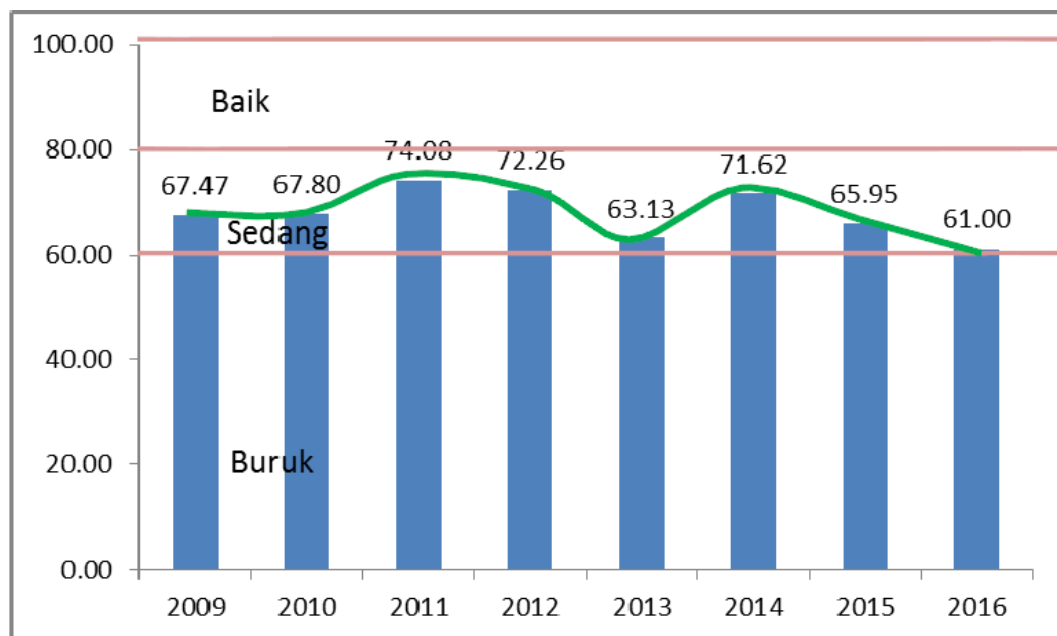
## **F. IDI Lampung 2016**

### **1. Perkembangan IDI Lampung 2016**

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Lampung tahun 2016 mencapai 61,00 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan sebesar 4,95 poin dibandingkan dengan IDI Lampung 2015 yang capaiannya sebesar 65,95. Meskipun mengalami penurunan,

tingkat demokrasi Lampung tersebut masih termasuk dalam kategori “sedang”.

Capaian IDI Lampung dari tahun 2009 hingga 2016 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI hanya sebesar 67,47. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen tertingginya pada tahun 2011 sebesar 74,08; walaupun pada akhirnya terus berfluktuasi hingga turun menjadi 61,00 di tahun 2016.



**Gambar 6: Grafik Perkembangan Skor IDI Lampung 2009-2016.**

Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Lampung. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas memang dirancang untuk sensitif terhadap naik- turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidence-

based) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas kehidupan demokrasi yang terjadi.

## **2. Perkembangan Indeks-Indeks IDI Lampung 2016**

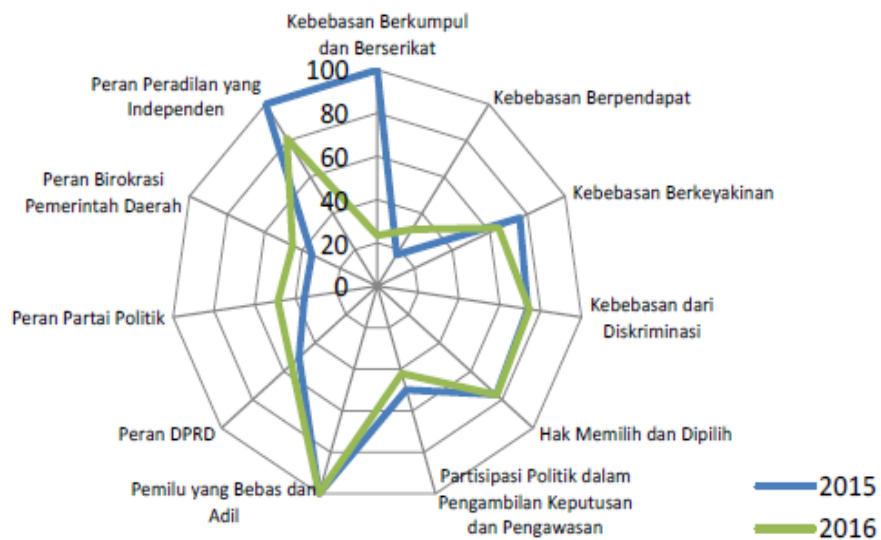
Angka IDI Lampung 2016 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 60,49; aspek Hak-Hak Politik yang bernilai 59,32; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 64,31. Pada tahun 2016, ada dua aspek yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015. yaitu aspek Kebebasan Sipil dan aspek Hak Politik. Sementara itu, aspek Lembaga Demokrasi justru mengalami kenaikan.

Dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2016, indeks aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan sebesar 11,5 poin (dari 71,99 menjadi 60,49), Hak-Hak Politik turun 3,87 poin (dari 63,19 menjadi 59,32), dan Lembaga-lembaga Demokrasi naik 1.57 poin (dari 62,74 menjadi 64,31). Bila dilihat berdasarkan kategorinya Aspek Kebebasan Sipil dan Lembaga Demokrasi masuk kategori sedang. Sedangkan Aspek Hak Politik menjadi berkategori rendah.

## **3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Lampung.**

Pada tahun 2016, dari 11 variabel pembentuk terdapat empat variabel yang mengalami penurunan indeks, dan enam variabel yang mengalami peningkatan dan 1 variabel yang tetap. Dari empat variabel yang mengalami penurunan, ada satu yang mengalami penurunan sangat

tajam yaitu variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat yang turun yaitu sebesar 76,56 poin, dari 100 pada 2015 menjadi 23,44 pada 2016. Penurunan terbesar kedua terjadi pada variabel Peran Peradilan yang Independen turun 18,75 poin, dari 100 pada 2015 menjadi 81,25 pada 2016.



**Gambar 7: Perkembangan Indeks Variabel IDI Lampung, 2015-2016**

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya didukung keterangan-keterangan dari berbagai pihak penulis menarik beberapa kesimpulan pada penelitian ini :

1. Alasan utama dibalik menurunnya Kebebasan Berserikat dan Berkumpul pada IDI Lampung 2016 adalah akibat adanya peningkatan penggunaan ancaman/kekerasan oleh aparat yang menghambat kebebasan berserikat dan berkumpul. Adanya peningkatan pada indikator tersebut, menyebabkan skor pada variabel kebebasan berserikat dan berkumpul mengalami penurunan.

Terdapat 3 kejadian utama dibalik peningkatan penggunaan ancaman/kekerasan oleh aparat yang menghambat kebebasan berserikat dan berkumpul; *pertama*, adanya pembubaran aksi penggalangan dana relawan Aqsa Working Group dan santri Pondok Pesantren Al Fatah, Muhajirun, Natar, yang disertai dengan perobekan, sebagai simbol kekerasan oleh Pol PP. *Kedua*,



Demonstrasi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang mempersoalkan infak ber-nominal, yang berakhir ricuh dengan disertai kekerasan oleh aparat keamanan kampus dan kepolisian. *Ketiga*, Pembekuan UKM SBI UIN Raden Intan Bandar Lampung oleh rektorat, sebagai buntut dari kejadian kedua.

Dalam hal ini kesalahan berada pada kedua belah pihak, karena masing-masing memiliki alasan yang masuk akal. Namun disini penulis lebih condong mendukung bahwa kesalahan utama berada pada pemerintah, karena;

- a. Penggunaan kekerasan/ represif dalam demokrasi merupakan hal yang jika bisa sangat dihindari, dan penggunaan kekerasan dan pembekuan merupakan pilihan yang buruk.
- b. Masyarakat memiliki hak yang dikenal dengan *Civil Disobediensce*, dimana masyarakat secara moral dibenarkan untuk tidak mematuhi aturan dengan alasan pertama, ditujukan pada rasa keadilan komunitas. Kedua jika berbagai upaya yang dilakukan dengan kehendak baik, untuk memperbaiki keadaan, dan ketiga, merupakan tuntutan prinsip rasa keadilan, khususnya yang menyatakan bahwa setiap orang dalam situasi yang sama harus mendapatkan perlakuan yang sama. aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa UIN Raden Intan tersebut sudah memenuhi ketiga syarat di atas.

2. Dampak dari permasalahan ini, walaupun untungnya tidak berpengaruh pada psikologis para aktivis mahasiswa UIN, namun secara tidak langsung, tetap merupakan suatu kerugian bagi pemerintah, karena sumberdaya, baik biaya maupun tenaga, yang sejatinya dapat digunakan untuk hal yang lebih produktif menjadi harus digunakan untuk mengatasi permasalahan ini.
3. Pemerintah sudah berupaya berkoordinasi dengan para instansi terkait dengan membentuk Pokja terkait pengembangan IDI, namun, dirasa belum sepenuhnya maksimal belum terlihat keseriusan dari pemerintah baik dalam menanggulangi permasalahan ini secara khusus maupun dalam menindaklanjuti hasil riset IDI secara umum. Penyebabnya adalah:

- a. *Political will*

Pemanfaatan lanjutan, baik berupa pengembangan ataupun perbaikan terkait temuan IDI terhambat salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya kepekaan serta kepedulian dari pemerintah terutama kepala daerah mengenai hasil temuan IDI. Riset IDI dibiarkan terus berjalan namun hasilnya tidak dimanfaatkan, jikapun ada program yang dibuat, hanya secara umum tidak spesifik menyangkut indikator yang capaiannya rendah.

- b. Kekurangan dana

Konsekuensi lanjutan dari tidak adanya *political will* mengenai pemanfaatan hasil IDI, berimbas pada tidak

digelontorkannya dana yang memadai ke sektor-sektor terkait, akibatnya tentu saja aparatur sebagai penggerak di akar rumput tidak bisa berbuat banyak dengan anggaran yang terbatas.

c. Kesulitan mengintegrasikan para *stakeholder*.

Para *Stakeholder* IDI yang merupakan gabungan dari beberapa lembaga, berasal dari latar belakang sosial dan struktural yang berbeda serta memiliki berbagai pemikiran yang berbeda-beda pula. Maka seringkali kesulitan mencapai kata sepakat mengenai program apa yang akan dilaksanakan, terlebih lagi dengan anggaran yang minim tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis akan memberikan beberapa saran terkait permasalahan dalam penelitian ini:

1. Kepada pihak rektorat UIN Raden Intan Bandar Lampung serta kepolisian, agar dalam menyikapi aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa dapat menggunakan pendekatan-pendekatan berbasis dialogis, menghindari cara-cara represif sebisa mungkin, karena bukan saja mahasiswa yang akan dirugikan namun juga akan merugikan pihak pemerintah sendiri, karena sumber daya yang seharusnya dapat digunakan

untuk hal produktif malah harus dialihkan untuk mengatasi permasalahan ini.

2. Diharapkan kedepannya pemerintah daerah, kesbangpol, BAPPEDA serta DPRD dapat lebih memanfaatkan hasil riset IDI dalam menyusun program-program kedepannya dengan memperkuat integrasi antar *stakeholder* yang berkaitan melalui Dukungan-dukungan, baik tenaga maupun biaya, yang berhubungan dengan upaya meindaklanjuti hasil temuan IDI dapat lebih dioptimalkan. Dengan begitu IDI dapat digunakan sebagai pegangan menata dan membangun serta merawat demokrasi lokal khususnya di Provinsi Lampung.
3. Kepada tim pokja IDI Provinsi Lampung. Pemerintah diharapkan mampu membudayaan demokrasi, dengan menempatkan agen-agen demokrasi di berbagai elemen masyarakat. Karena itu, tugas Pokja IDI seharusnya tidak hanya berhenti pada tataran elit, namun bagaimana menciptakan agen-agen untuk tumbuh dan menjalankan fungsinya.
4. BPS Pusat, Bappenas serta *stakeholder* lainnya yang bertindak mengevaluasi riset IDI dapat mempertimbangkan temuan-temuan serta kritik dalam penelitian ini khususnya yang berkenaan dengan metodologi, agar kedepannya riset IDI dapat semakin baik dan lebih dapat menggambarkan kenyataan dilapangan dengan sebenarnya.

5. Kepada Tim BPS Provinsi di seluruh Indonesia yang bertugas menyusun IDI khususnya Provinsi Lampung, sebaiknya dalam proses pengumpulan data, lebih mengutamakan aspek-aspek yang sifatnya kualitatif, FGD misalnya, daripada koding koran sebagai instrumen pengumpulan data utama, agar data yang didapat kedepannya tidak terlalu bergantung pada sudut pandang serta keterbatasan-keterbatasan yang banyak dimiliki oleh koran tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali-Fauzi, dan Mujani. 2009. *Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis atas Perda Syari'ah*. Jakarta: Nalar.
- Bedau, H.A. ed. 2002. *Civil disobedience in focus*. Edinburgh: Routledge.
- Budiardjo, M. 2003. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: IKAPI.
- Dahl, R.A. 1999. *Can international organizations be democratic? A skeptic's view*. Democracy's edges, pp.19-36. New York: Cambridge University Press.
- Gismar, A.M. dan Hidayat, S. 2010. *Reformasi Setengah Matang*. Jakarta. Mizan.
- Gladius, M. 2010. *Expertise in the cause of justice: Global Civil Society influence on the statute for an international criminal court*. Oxford: Oxford University Press.
- Hidayat, K. dan Azra, A. 2006. *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Higley, J. dan Gunther, R. 1992. *Elites and democratic consolidation in Latin America and Southern Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hikam, M.A. 1996. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka Lp3es.
- John, S. James, P. dan George, M. 1982. *Political tolerance and american democracy*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Mahfud, M.D. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Mujani, S. 2007. *Muslim demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Pridham, G. 2001. *The dynamics of democratization: a comparative approach*. London: Bloomsbury Publishing PLC.
- Przeworski, A. 1991. *Democracy and the market: Political and economic reforms in Eastern Europe and Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- RauF, M. dkk. 2009. *Menakar Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: UNDP Indonesia
- Huntington, S. 1991. *The Third Wave: Democratization In The Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Sufyanto, M.T. 2001. *Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LP2IF.
- Tornquist, O. 2005. *Menjadikan Demokrasi Bermakna: Masalah dan Pilihan Indonesia*. Jakarta: Demos.
- Widjojo, M.S. 1999. *Penakluk Rezim Orde Baru: Gerakan Mahasiswa'98*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Wirawan. 2009. *Konflik dan manajemen konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Yusron. 2009. *Elite Local dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES

## **Jurnal**

- Agustinus, L. 2006. Kilasan Singat Mengenai Demokrasi. *Jurnal Mandatory*. 2(1): 125-14
- Asfar, M. 2001. Wacana Masyarakat Madani (Civil-Society): Relevansi Untuk Kasus Indonesia. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*. 17(1): 49-60.
- Diamond, L.J. 1996. Is the third wave over?. *Journal of democracy*. 7(3): 20-37.
- Edward dan Jack. 2007. *Journal of Democracy*. 18(3): 5-9
- Ibrahim, I. 2017. Menakar kedalaman pengukuran demokrasi model Indeks Demokrasi Indonesia (IDI): Beberapa catatan substantif dari Kepulauan Bangka Belitung. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. 30(2): 133-149.
- Pabottingi, M. 2013. Kepemimpinan dan Demokrasi Kita: Akar-akar Kebangkrutan Kepemimpinan di Era Reformasi, dan Jalan Menuju Kebangkitan. *Prisma*. 4: 3-27
- Putnam, R.D. 1996. The Decline of Civil Society: How Corne? SO What?. *The Journal of Public Sector Management*. 27(1): 28-36

Hadiwinata, B.S. 2005. Civil society: Pembangun dan Sekaligus Perusak. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 24(3): 205

Samadhi, Prasetyo. 2017. Gerakan Pro-Demokrasi: Mengambang Tanpa Strategi yang Berakar. *Jurnal Negara, Kesejahteraan dan demokrasi*. 36(1): 67-82.

### **Disertasi**

Samadhi, W.P. Santoso, P. 2015. *Optimalisasi kapasitas politik aktor demokrasi melalui pengembangan blok politik kesejahteraan*. Disertasi: Universitas Gadjah Mada.

### **Prosiding Seminar**

Asshiddiqie, J. 2007. Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya. *Disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapannya Bersama*, 27 November 2007, Jakarta.

### **Internet**

Fukuyama, F. 2016. *American Political Decay or Renewal: The Meaning of the 2016 Election*. <https://www.foreignaffairs.com/articles/united-state/2016-06-13/american-political-decay-or-renewal>. Diakses pada 25 mei 2018.

<http://elsam.or.id/2017/10/hoax-berita-palsu-dan-ancamannya-terhadap-kebebasan-sipil/>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2016.

<http://harianlampung.com/index.php?k=Politik&i=39320-Indeks-Demokrasi-Lampung-Urutan-Ke-26-Nasional>. Diakses pada 19 april 2018

<http://inilampung.com/201803/mahasiswa-uin-raden-intan-demo-kejelasan-prodi#>. Diakses pada 25 mei 2018.

<http://www.harianfokus.com/2016/04/29/demo-dugaan-pungli-ukm-sbi-disegel-dan-mahasiswa-iain-ditangkap/>. Diakses pada 4 april 2018.

<http://www.infokyai.com/2017/05/ukt-uin-lampung-tak-kunjung-selesai-mahasiswa-demo-kembali.html?m=>. Diakses pada tanggal 25 mei 2018.

<http://www.infokyai.com/2017/08/sejumlah-mahasiswa-uin-lampung-demo.html?m=1>. Diakses pada tanggal 25 mei 2018.

<http://www.nyokabar.com/berita-2475-mahasiswa-iain-bandar-lampung-kembali-ricuh.html>. Diakses pada tanggal 4 april 2018.



<http://www.nyokabar.com/berita-2475-mahasiswa-iain-bandar-lampung-kembali-ricuh.html>. Diakses pada 4 april 2018.

<https://lampung.antaranews.com/berita/302926/lampung-kembali-raih-provinsi-terbaik-penanganan-konflik-sosial>. Diakses pada tanggal 18 april 2018.

<https://fajarsumatera.co.id/indeks-demokrasi-lampung-menurun-kesbangpol-bentuk-pokja/>. Diakses pada 25 mei 2018

<https://lampung.antaranews.com/berita/290332/demo-mahasiswa-iain-lampung-berakhir-ricuh>. Diakses pada tanggal 4 april 2018.

<https://news.detik.com/berita/d-3350912/kapolda-lampung-siapkan-maklumat-larang-warga-demo-ke-jakarta-2-desember>. Diakses pada 9 februari 2018

<https://sumbar.antaranews.com/berita/223474/indeks-demokrasi-sumbar-dinilai-buruk-gubernur-kritik-bps>, diakses 15 September 2018.

<https://www.jejamo.com/pol-pp-bandar-lampung-bubarkan-aksi-galang-dana-suriyah-kardus-dirobek-relawan-putri-hendak-diangkut-pakai-mobil.html>. Diakses pada tanggal 4 april 2018.

<https://www.kupastuntas.co/2016/04/29/rektor-iain-raden-intan-lampung-mukri-tidak-ada-pungli-di-iain/>. Diakses pada 15 april 2018.

<https://www.youtube.com/watch?v=uynXF-Lhp8g>. Diakses pada 15 april 2018

## **Dokumen Resmi**

Provinsi Lampung. 2017. Berita resmi statistik No. 16/09/Th.IV tentang IDI Lampung 2016. BPS Provinsi Lampung. Teluk Betung.

Provinsi Lampung. 2016. Keputusan Gubernur Lampung No: G/280/II.03/HK/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung. Gubernur Lampung. Teluk Betung.

Republik Indonesia. 1998. Ketetapan MPR No. XVV/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Republik Indonesia. 1998. Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Lembaran Negara RI Tahun 1998. Sekretariat Negara. Jakarta.